



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Laporan sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memberikan arah dan target secara transparan kepada organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Strategis periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai indikator target pertahunnya.

Guna pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan maka disusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam hal ini adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 ini disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memberikan deskripsi menyeluruh terhadap capaian kinerja secara periode triwulan sebagai alat analisa dan evaluasi guna memberikan masukan dan arahan terhadap perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini sebagai bagian dari langkah dan strategi untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada khususnya untuk mencapai target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Akhir kata, Atas ijin Allah SWT Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Jakarta, 20 Januari 2023
Plt. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 4
C. Sumber Daya Manusia	I - 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	II - 1
A. Perencanaan Strategis	II - 1
B. Perjanjian Kinerja	II - 16
BAB III AKUNTABILITAS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	
A. Capaian Kinerja	III - 1
B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	III - 4
C. Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022	III - 6
D. Analisa Efisiensi Sumber Daya	III - 53
E. Realisasi Anggaran	III - 60
BAB III PENUTUP	III - 1
III.1 Kesimpulan	III - 1
III.2 Langkah Kedepan	III - 5

DAFTAR TABEL

I.1	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan	I	-	10
I.2	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan	I	-	10
II.1.1	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015 - 2017	II	-	4
II.1.2	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2018 - 2019	II	-	8
II.1.3	Perkembangan Alokasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	II	-	12
II.1.4	Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015 - 2019	II	-	12
II.1.5	Isu Strategis Bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	II	-	13
II.1.6	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020 - 2024	II	-	14
II.1.7	Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional Bidang Transportasi Laut dalam RPJMN 2020-2024	II	-	16
II.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (awal)	II	-	17
II.2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (revisi)	II	-	18
III.2.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022	III	-	4
III.3.1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen HUBla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	III	-	6
III.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKK 1) Kesatu (1).....	III	-	8
III.3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1).....	III	-	9
III.3.4	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	III	-	9
III.3.5	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)	III	-	10
III.3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2).....	III	-	11
III.3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2)	III	-	12

III.3.8	Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	III - 12
III.3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3).....	III - 14
III.3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3).....	III - 15
III.3.11	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	III - 15
III.3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)	III - 17
III.3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)	III - 17
III.3.14	Disepakatinya Perjanjian Kerjasama di Bidang Transportasi Laut	III - 19
III.3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)	III - 23
III.3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)	III - 24
III.3.17	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	III - 24
III.3.18	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021	III - 25
III.3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)	III - 26
III.3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)	III - 26
III.3.21	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	III - 27
III.3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)	III - 28
III.3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)	III - 29
III.3.24	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	III - 29
III.3.25	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut Perbulan	III - 33
III.3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8).....	III - 42

III.3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8)	III - 42
III.3.28	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru / Revisi / Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	III - 43
III.3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9).....	III - 45
III.3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9)	III - 45
III.3.31	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	III - 47
III.3.32	Realisasi Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara (BMN)	III - 48
III.3.33	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)	III - 49
III.3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)	III - 50
III.3.35	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	III - 50
III.3.36	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas (11)	III - 52
III.3.37	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas (11)	III - 52
III.4.1	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	III - 53
III.5.1	Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022	III - 60

DAFTAR GRAFIK

III.3.1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	III - 7
III.3.2	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	III - 10
III.3.3	Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	III - 13
III.3.4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	III - 16
III.3.5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	III - 18
III.3.6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	III - 25
III.3.7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	III - 27
III.3.8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	III - 33
III.3.9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru / Revisi / Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	III - 45
III.3.10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	III - 48
III.3.11	Jumlah KSP Yang Di Laksanakan	III - 51

DAFTAR GAMBAR

- I.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut... I - 4



BAB I

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang yang lebih difokuskan pada keuangan, hal itu menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang pertanggungjawaban keuangannya diterima tanpa syarat. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat pada umumnya, baik dilihat dari hasil maupun dampak dari kegiatan tersebut dapat menyadari kekeliruan dimasa yang lalu dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai langkah maju diperlukan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 dikeluarkan Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Capaian Kinerja, dan juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2022 secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan laporan atas pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya stratejik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran stratejiknya dalam kerangka pemenuhan Sasaran Program yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis serta Sasaran Program organisasi telah dibakukan di dalam suatu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disebut Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam mendukung capaian sasaran strategis ditetapkan sejumlah Indikator Keluaran Program. Pemenuhan atas sasaran stratejik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan stratejik organisasi di akhir tahun kelima.



Dasar Hukum Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025,
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah,
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara,
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan,
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
12. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah,
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/ 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan instansi Pemerintah,
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



- 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan,
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,;
 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019.
 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 26. Surat Keputusan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
 27. Surat Keputusan Direktorat Jenderal tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024.



B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Setditjen Hubla adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan PM 17 Tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Jenderal Perhubungan Laut.

2. Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
- b. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;



- c. Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

3. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- e. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

a. Bagian Perencanaan

1) Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



2) Fungsi Bagian Perencanaan

- a) Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Bagian Keuangan

1) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Keuangan

- a) Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan revidi revisi anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- b) Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan



- c) Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan revidi laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan,
- d) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ektern, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil revidi laporan keuangan.

c. Bagian Sumber Daya Manusia

1) Tugas Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Sumber Daya Manusia

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.

d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

1) Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi



hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

- a) Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- b) Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

e. Bagian Umum dan Perlengkapan

1) Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik



Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

1) Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standardisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2022 yaitu 309 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.1. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1.	S3	0	0
2.	Spesialis	1	1
3.	S2	47	47
4.	S1	126	135
5.	D4	1	2
6.	D3	57	40
7.	D2	0	0
8.	D1	2	10
9.	SLTA	95	74
10.	SLTP	3	0
11.	SD	1	0
TOTAL		333	309

- b. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.2. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	1	0
3.	IV/c	1	1
4.	IV/b	6	4
5.	IV/a	8	7
6.	III/d	53	66
7.	III/c	63	49
8.	III/b	96	78
9.	III/a	33	44
10.	II/d	32	26
11.	II/c	33	18
12.	II/b	4	3
13.	II/a	2	9
14.	I/d	1	1
15.	I/c	0	0
16.	I/b	0	0
17.	I/a	0	0
TOTAL		333	309



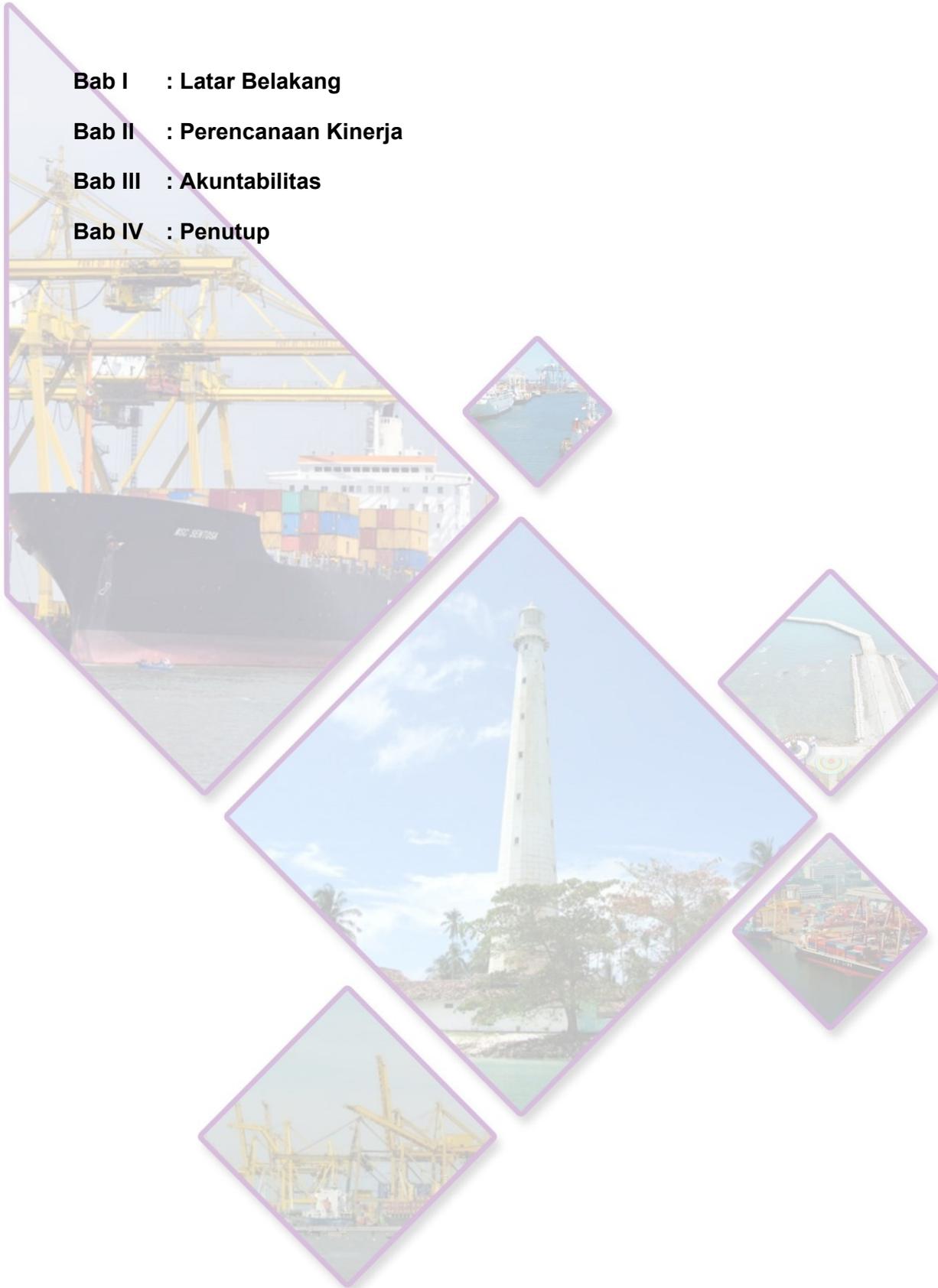
D. SISTEMATIKA LAPORAN

Bab I : Latar Belakang

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab III : Akuntabilitas

Bab IV : Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2022

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada RENSTRA Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2020 - 2024) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024.

Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2019

Evaluasi atas capaian kinerja berupa realisasi dari target pencapaian Sasaran Strategis (SS) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019

yang diukur melalui pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah IKU serta sasaran yang telah ditetapkan:

1. Pada sasaran "**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Administrasi dan Teknis**" dengan indikator kinerja utama, meliputi:
 - Jumlah kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi (IT).
 - Jumlah Pedoman/ Standar/ Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.
2. Pada sasaran "**Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dan Kompetensi SDM Aparatur/ Teknis**" dengan indikator kinerja utama, meliputi:
 - Jumlah SDM transportasi laut yang bersertifikat (aparatur teknis).
 - Jumlah Kebutuhan Tenaga CPNS.
 - Jumlah Pegawai yang Mutasi.
 - Jumlah Pegawai yang Pensiun.



- Jumlah Penyelenggaraan Bimtek terkait Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Umum dan Perlengkapan dan Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
 - Jumlah penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi.
3. Pada sasaran “**manajemen pengelolaan keuangan, Asset dan PNBP**” dengan indikator kinerja utama, meliputi:
- Prosentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 - Nilai BMN pada neraca Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut.
 - Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut.
4. Pada sasaran “**Meningkatnya manajemen kinerja melalui dukungan administrasi dan teknis**” dengan indikator kinerja utama meliputi:
- Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan Administrasi dan Teknis
 - Jumlah kegiatan Evaluasi / Monitoring / Pembinaan / Penyuluhan / Sosialisasi
 - Jumlah Studi dan Kajian yang disusun.
5. Pada sasaran “**Meningkatnya pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perkantoran lainnya**” dengan indikator kinerja utama meliputi:
- Volume Gedung Kantor yang Fungsinya terpulihkan (Gedung).
 - Jumlah waktu terpulihkannya fungsi peralatan/perlengkapan kantor.
 - Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor.
 - Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional.
 - Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran.
6. Pada sasaran “**Meningkatnya pemenuhan dan efektifitas pelaksanaan regulasi dalam penyelenggaraan Transportasi Laut**” dengan indikator kinerja utama, meliputi:
- Jumlah rancangan dan peraturan yg ditetapkan.
 - Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan.
 - Jumlah penyelesaian perkara.
7. Pada sasaran “**Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional**” dengan indikator kinerja utama meliputi:
- Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri.



- Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan dan Perjanjian dalam rangka Kerjasama Bilateral, Regional, Multilateral.

8. Pada sasaran **“Meningkatnya kinerja kehumasan dalam mem-fasilitasi peningkatan peran serta stakeholders”** dengan indikator kinerja utama meliputi:

- Jumlah kegiatan Pelayanan informasi bagi Masyarakat Umum.
- Jumlah kegiatan Kehumasan dan Protokoler.





Tabel II.1.1. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2015			2016			2017		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1. Jumlah kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi (IT)	Sistem	3	4	133,33	6	4	66,67	1	2	200
2. Jumlah Pedoman/ Standar/ Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan	Pedoman/ Standar/ Protap	3	3	100	6	3	50	3	1	33.33
3. Jumlah SDM transportasi laut yang bersertifikat (aparatur teknis)	Orang	3.870	954	24,65	3.511	3.429	97,66	4.621	4.782	103,48
4. Jumlah Kebutuhan Tenaga CPNS	Orang	1.876	0	0	3.250	22	0,67	3.295	0	0
5. Jumlah Pegawai yang Mutasi	Orang	720	885	122,92	720	1.151	159,86	1.072	858	80,03
6. Jumlah Pegawai yang Pensiun	Orang	82	108	131,71	522	462	88,51	549	577	105,10
7. Jumlah Penyelenggaraan Bimtek terkait Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Umum dan Perlengkapan dan	Bimtek	2	2	100	9	6	66,7	9	9	100



Organisasi dan Hubungan Masyarakat.											
8. Jumlah penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi	Diklat/ Bimtek	2	1	50	5	4	80	6	6	100	
9. Prosentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	87,14	63,37	72,72	90	81,07	90,08	92.50	84.59	91.45	
10. Nilai BMN pada neraca Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut	Rp	46.047.331.8 83.767	130.375.273. 633.433	283,13 3	42.403.073.5 79.705	27.026.7 55.313.9 19	63,74	2,256,561,887 ,757	28,266,123 ,121,419	1,253	
11. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut	Rp	620.986.332. 124	1.605.754.55 8.169 258,58	258,58	58.208.694.1 28	75.055.153 .765	128,94	63,238,567,311	123,643,452 ,627	195.52	
12. Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan Administrasi dan Teknis	Dokumen	5	6	120	31	30	96,77	20	20	100	
13. Jumlah kegiatan Evaluasi / Monitoring / Pembinaan / Penyuluhan / Sosialisasi	Dokumen	15	19	126,67	76	63	82,89	27	25	92,59	
14. Jumlah Studi dan Kajian yang disusun	Studi/ Kajian	2	3	150	5	4	80	4	4	100	



15. Volume Gedung Kantor yang Fungsinya terpulihkan (Gedung)	M3	28.428	28.428	100	28.900	28.900	100	28,900	28,894	99.97
16. Jumlah waktu terpulihkannya fungsi peralatan/perengkapan kantor	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
17. Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/perengkapan kantor	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
18. Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
19. Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
20. Jumlah rancangan dan peraturan yg ditetapkan	Peraturan	14	39	278,57	28	28	100	18	25	138.89
21. Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	Peraturan	14	16	114,28	10	10	100	10	7	70
22. Jumlah penyelesaian perkara	Perkara	4	6	150	13	11	84.61	7	5	71.43
23. Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Perjanjian	20	19	95	6	3	50	7	5	71.43



24. Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan dan Perjanjian dalam rangka Kerjasama Bilateral, Regional, Multilateral	Pertemuan/ Perjanjian	30	58	193,33	16	17	106,25	19	18	94.74
25. Jumlah kegiatan Pelayanan informasi bagi Masyarakat Umum	Kegiatan	15	16	106,67	6	6	100	6	5	83.33
26. Jumlah kegiatan Kehumasan dan Protokoler	Kegiatan	15	33	220	16	16	100	16	12	75

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 - 2017





Pada periode 2018 dan 2019 terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari yang awalnya (pada periode 2015-2017) sebanyak 26 Indikator, menjadi 36 Indikator sehingga disajikan pada Tabel II.2. berikut :

Tabel II.1.2. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2018-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2018			2019		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1. Prosentase Peningkatan Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang Bersertifikat	%	80	98,96	123,70	90	96,40	107,11
2. Prosentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Hubla	%	80	80	100	100	100	100
3. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Hubla (Skala Likert 1-5)	Nilai	4	4	100	4	4	100
4. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Ditjen Hubla	%	82,55	86,22	104	97	0	0
5. Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Hubla	%	80	71,45	89,3	90,50	89,98	99,43
6. Jumlah Dokumen dan Laporan yang Disusun terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya	Dokumen	5	5	100	5	5	100
7. Jumlah Pembinaan, Sosialisasi, dan Koordinasi terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya	Kegiatan	50	50	100	50	50	100
8. Jumlah Studi dan Kajian yang Disusun	Dokumen	2	4	200	2	2	100
9. Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun	Dokumen	336	336	100	302	302	100
10. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan	Kegiatan	3	3	100	6	6	100
11. Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keuangan	Kegiatan	10	9	90	6	6	100



INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2018			2019		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
12. Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi	Kegiatan	8	8	100	8	10	125
13. Jumlah Penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional	SK	4142	7282	175,81	412	6127	147,9
14. Prosentasi Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai	%	50	72,26	122,26	100	100	100
15. Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan Yang Ditetapkan	Dokumen	20	10	50	10	9	90
16. Jumlah Peraturan Perundangan yang telah disosialisasikan	Dokumen	8	9	112	8	5	62,5
17. Jumlah Penyelesaian Perkara	Dokumen	5	7	140	5	2	40
18. Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	6	7	116	6	9	150
19. Jumlah Perjanjian, Kerjasama Bilateral, regional dan Multilateral	Dokumen	2	2	100	2	0	0
20. Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama	Kegiatan	18	18	100	18	14	77,78
21. Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran	%	100	82,33	82,33	100	93,05	93,05
22. Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahaantagaan	%	100	85,24	85,24	100	85,73	85,73
23. Nilai BMN Pada Neraca Ditjen Perhubungan Laut	Rp	48.834.429.426.125	54.178.537.670.152	110,9	59.137.268.800.155	55,661,604,024,873	94,12
24. Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat	Kegiatan	4	5	125	5	5	100

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 – 2017



INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2018			2019		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
25. Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokol	Kegiatan	14	17	121	14	16	114,29
26. Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi (IT)	Kegiatan	2	2	100	2	3	150
27. Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkiat RB	Kegiatan	4	4	100	4	4	100
28. Jumlah Dokumen RB yang Disusun	Kegiatan	4	4	100	2	2	100
29. Jumlah SDM Sesditjen Yang Mengikuti Diklat/Bimtek	Orang	27	20	74,07	133	133	100
30. Jumlah Sistem dan Informasi di Lingkungan Sesditjen Hubla	Unit	1	1	100	1	1	100
31. Persepsi Publik Terkait Pelayanan Informasidi Sesditjen Hubla (1-10)	Nilai	9	8	88,88	9	8	88,89
32. Jumlah Dokumen SAKIP yang Disusun	Dokumen	5	5	100	5	5	100
33. Persentase Penyerapan Anggaran Sesditjen Hubla	%	80	87,12	108	91,09	94,40	103,63
34. Nilai Kinerja Anggaran Sesditjen Hubla	%	80	87,14	108,92	91,09	103,63	113,77
35. Nilai BMN Sesditjen Hubla	Rp	4.040.035.615 .382	9.832.434.50 0	96.73	3,938.416.805 .293	2.341.781.591 .776	59,46
36. Target PNBPN Sesditjen Hubla	Kegiatan	73.206.150.00 0	78.300.863.0 13	106,96	61.792.762.56 1	85.328.279.78 2	138,09

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 - 2017



Rencana, Alokasi dan Realisasi Kinerja Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019

1. Pada **Tabel II.1.3.** disampaikan perbandingan antara rencana kebutuhan anggaran, yang termuat di dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019, dengan alokasi anggaran yang diperoleh berdasarkan data DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada setiap tahunnya. Perbedaan alokasi anggaran ini dapat menyebabkan beberapa target kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis tidak dapat tercapai sepenuhnya.
2. Pada **Tabel II.1.4** disampaikan perbandingan antara alokasi anggaran (DIPA) dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019.





Tabel II.1.3. Perkembangan Alokasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015 - 2019

(Dalam Ribu Rupiah)

No.	Program/ Kegiatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Renstra	Alokasi Anggaran	%												
1.	Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Setditjen Hubla	4.673,399	879,429		5.791,101	337,872		6.659,766	328,659		7.658,731	14,417		8.807,541	407,139	

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015- 2019

Tabel II.1.4. Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2019

(Dalam Ribu Rupiah)

No.	Program/ Kegiatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%									
1.	Belanja Pegawai													115.128.971.000	112.218.097.687	97,47
2.	Belanja Barang													272.138.122.000	253.508.435.202	93,15
3.	Belanja Modal													19.872.151.000	18.617.404.600	93,69
	TOTAL													407.139.244.000	384.343.937.489	94,40

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015- 2019



Isu Strategis Bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menjadi isu strategis dan perlu diselesaikan dalam kerangka waktu pelaksanaan renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 diuraikan pada Tabel 1.4

Tabel II.1.5. Isu Strategis Bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Alokasi Formasi CPNS Teknis dan Non Teknis • Pemeliharaan Kompetensi Pelaut PNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Pemanfaatan E-Planning Pada Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
3.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sistem informasi E-Persuratan sebagai Alat Bantu/Pedoman Untuk Pencatatan/Pemilahan Surat Masuk/Dossier, Mail Tracking, Proses Disposisi, Pembuatan/ Konsep Surat Keluar/Nota Dinas
4.	Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Integrasi Database Pembangunan • Infrastruktur Transportasi Laut Pengusulan Jenis Barang Pada Proses Pengadaan Melalui E-Katalog • Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Aplikasi Informasi Eksekutif Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
5.	Regulasi dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Familiarisasi / Hearing Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Dengan Stakeholder
6.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Guna kelengkapan dokumen administratif dalam pelaksanaan tata hubungan kerja antar unit/sub unit dalam satu organisasi, akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis dan SOP pada UPT Ditjen Hubla
7.	Manajemen Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Berjenjang (Eselon I S/D Eselon IV)
8.	Kinerja dan Dampak Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penggunaan media sosial untuk mensosialisasikan / mempublikasikan kinerja Ditjen Hubla kepada masyarakat



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Muatan tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional untuk periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini disadur dari RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020

Tabel II.1.6 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia merupakan modalutama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.



No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Memperkuat moderasi beragama; dan 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 2) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 3) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.



B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah dirumuskan tujuan dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan kegiatan dukungan manajemen teknis di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2022 yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 disusun setelah DIPA Tahun 2022 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang memuat pernyataan Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:



Tabel II.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Awal)

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut					
SK 6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di Bidang transportasi laut	Kerjasama	21
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,17
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Konsep peraturan	14
		IKK 10	Pencapaian target penetapan status penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	10
		IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	KSP	9



Tabel II.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Revisi)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut					
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen Dan Teknis Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan Kompetensi Sdm Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900
		IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	12
		IKK 6	Nilai Akip Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85
		IKK 7	Nilai Maturitas Spip Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	93,98
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Jumlah	10
		IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	Jumlah	10
		IKK 11	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	Jumlah	3



BAB III

AKUNTABILITAS

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2022

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari target yang ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Kinerja. Pengukuran kinerja ini mencakup:

- 1. Perencanaan Kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
- 2. Perjanjian Kinerja** adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
- 3. Pengelolaan Data Kinerja** adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja.



4. **Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
6. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- b) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada tinjauan ucxlang RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Terhadap target capaian kinerja yang telah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Program



di dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja atau dokumen PK, di dalam dokumen PK menetapkan target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja.





B. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Tabel III.2.1 Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					CAPAIAN KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9	0	0	0	0	0	0
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300	120	150	240	300	300	100
		IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85	85	85	85	83	83	97,65
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4	4	4	4	4	4	100
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	21	6	12	23	27	27	128
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	0	0	80,42	80,42	80,42	94,61
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	0	3,578	3,578	3,578	3,578	119,26



		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	98,24	13,55	36,70	58,57	97.	96,97	98,71
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Konsep Peraturan	14	5	8	11	14	14	100
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Status BMN	10	3	5	7	10	10	100
		IKK11	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	KSP	9	0	2	3	3	3	100



C. CAPAIAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2022

1. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen Dan Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

a. **Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan.**

1) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan (IKK1)**

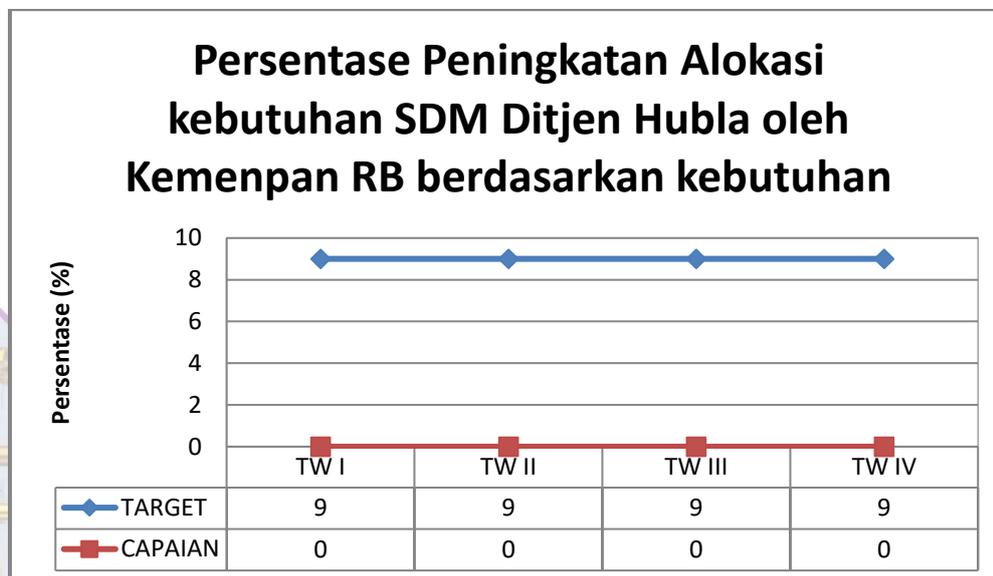
Tabel III.3.1 Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 1 Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9	0	0	0	0	0	0

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 9%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tidak terdapat realisasi, dikarenakan untuk tahun 2022 Kementerian Perhubungan belum menyelenggarakan penerimaan CPNS, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 0%.

Grafik III.3.1 Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan



Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan upaya - upaya untuk Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai berikut:

- a) Melakukan Verifikasi Eksisting terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- b) Mengalokasikan dari hasil jalur pola pembibitan yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- c) Mengalokasikan dari hasil jalur Politeknik Keuangan Negara STAN yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan (IKK1) Kesatu (1) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1) pada Tahun 2022 terdapat target yang sama dengan Tahun 2021 sebesar 9 %. Adapun pada Tahun 2022 tidak terdapat realisasi sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan tidak ada penerimaan CPNS sehingga persentase sebesar 0% sedangkan pada Tahun 2021 terdapat realisasi 0,09% dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan Kondisi Keuangan Negara dan Kebijakan Kemenpan RB, sehingga dari total target penerimaan CPNS sebesar 1.197 hanya tercapai 118 CPNS sehingga Persentase hanya sebesar 10%.



Tabel III.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1)

IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	Target	9	9
				Realisasi	0,09	0
				Kinerja (%)	10	0

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan (IKK1) Kesatu (1) :

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kesatu (1) "Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan" pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja 0% sedangkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 9% sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 0%, dikarenakan pada Tahun 2022 tidak ada penerimaan CPNS.



Tabel III.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9	0	0

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

b. Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut (IKK
- 2) Kedua (2) :

Tabel III.3.4 Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 2	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300	120	150	240	300	300	100%

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 300 sertifikat. Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 300 sertifikat. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi sebesar 150 Sertifikat sehingga Prosentase Pencapaian terhadap target sebesar 50%, sedangkan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 240 Sertifikat sehingga Prosentasi Pencapaian Terhadap Target sebesar 72 %. Pada realisasi Triwulan IV menjadi 300 sertifikat sehingga prosentase terhadap target sebesar 100%. Pada Tahun 2022 terdapat penambahan 60 sertifikat dari kegiatan pelaksanaan Diklat Peningkatan Perwira Kapal Negara (DPKN).

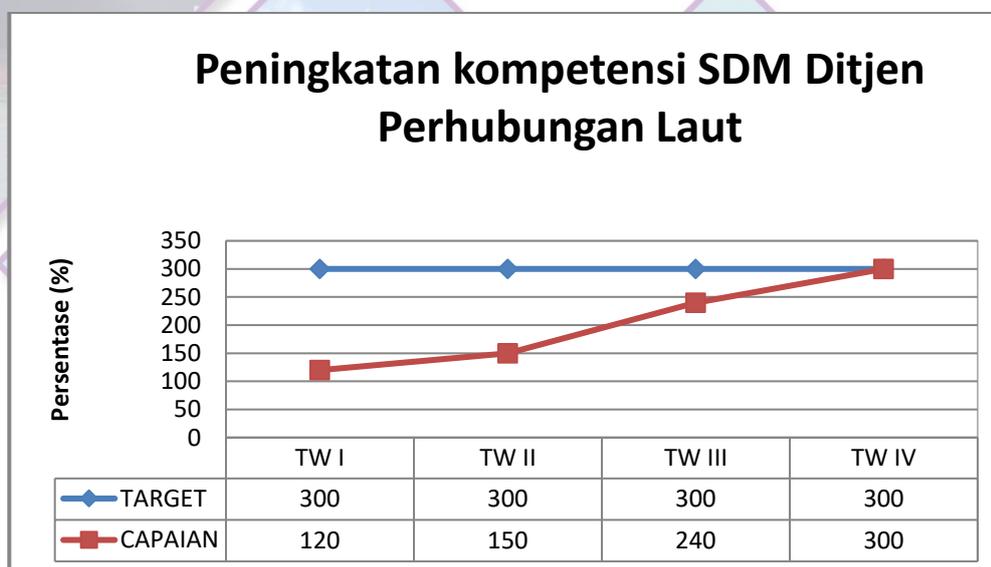


Tabel III.3.5 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)

NO	DIKLAT	JUMLAH PESERTA	PEMBUKAAN	PENUTUPAN	KELULUSAN
1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I	40	24 Januari 2022	27 Mei 2022	40
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II	40	31 Januari 2022	03 Juni 2022	40
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan III	40	07 Februari 2022	09 Juni 2022	40
4	Training Course for Instructor (TOT IMO Model Course 6.09)	30	30 Mei 2022	8 Juni 2022	30
5	Pelatihan BST, SAT , AFF Angkatan I	30	17 Juli 2022	30 Juli 2022	30
6	Training Course for Instructor (TOT IMO Model Course 6.09)	30	1 Agustus 2022	10 Agustus 2022	30
7	Pelatihan BST, SAT , AFF Angkatan II	30	4 September 2022	17 September 2022	30
8	Upgrading Ijazah Pelaut (DPKN Tk.III)	60	30 Mei	5 November 2022	60
	JUMLAH PESERTA DIKLAT TRIWULAN IV	300			300

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Grafik III.3.2 Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut



Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai berikut :

- a) Telah dilaksanakan Diklat TOT 6.09 Angkatan II pada bulan Agustus 2022;



- b) Telah dilaksanakan Peningkatan Kompetensi *Basic Safety Training* (BST), *Security Awareness Training* (SAT), *Advance Fire Fighting* (AFF) yang masing - masing 2 angkatan dilaksanakan pada bulan Juli dan September 2022;
- c) Telah dilaksanakan Evaluasi dan Pendataan Diklat pada bulan September 2022.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut (IKK 2) Kedua (2) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2) pada Tahun 2022 terdapat target sebesar 300 sertifikat dan terealisasi menjadi 300 sertifikat sehingga prosentase terhadap target sebesar 100%, terdapat penambahan 60 sertifikat dari kegiatan pelaksanaan Diklat Peningkatan Perwira Kapal Negara (DPKN) sedangkan pada Tahun 2021 terdapat target sebesar 1.900 sertifikat dan terealisasi sebanyak 889 Sertifikat sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 46,79%, karena pemotongan anggaran dan adanya Pergub DKI No.106 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Ibu Kota sehingga berpengaruh kepada pembatasan pelaksanaan Diklat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel III.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2)

IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	%	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut		Target	1.900	300
				Realisasi	889	300
				Kinerja (%)	46,79	100

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut (IKK 2) Kedua (2) :

Indikator Kinerja (IKK) Kedua (2) "Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut" pada Tahun 2022 terdapat realisasi sebesar 300 sertifikat dan untuk target



yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 300 sertifikat sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 100%.

Tabel III.3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.2	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300	300	100

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

c. Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 3) Ketiga (3)

Tabel III.3.8 Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85	85	85	85	83	83	97,65

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

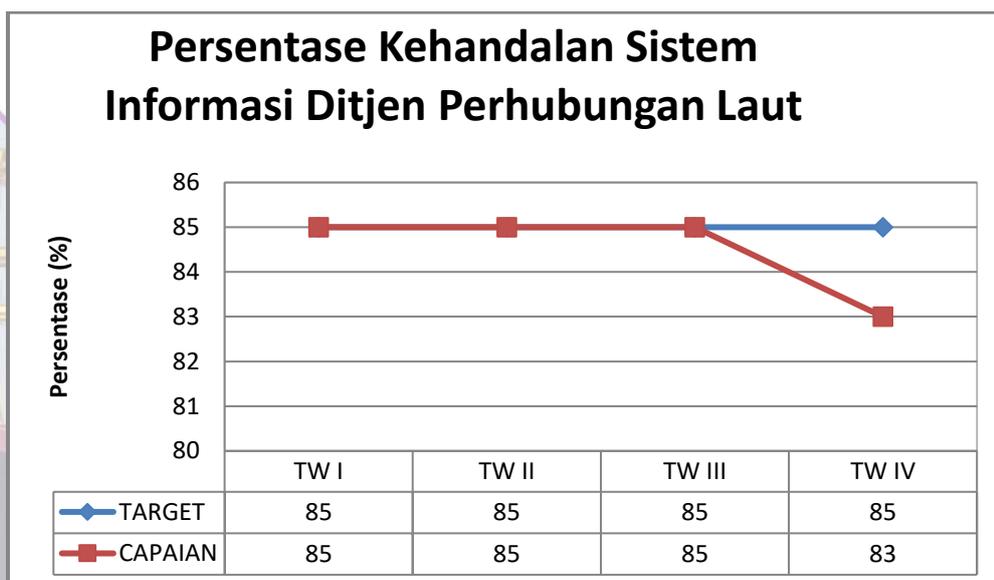
Adapun Sesuai dengan target tahun 2022 nilai rata-rata kehandalan sistem informasi Ditjen Hubla sebesar 85% dengan realisasi pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III sebesar 85% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%, sedangkan Triwulan IV sebesar 83% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 97,65%, dikarenakan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) beberapa kali mengalami *downtime*. Ini diakibatkan karena transaksi yang begitu tinggi pada layanan e-blanko PNPB yang mengakibatkan kapasitas server kami tidak



dapat menampung transaksi tersebut. Adapun sistem Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI), Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIRANI) dan Portal Hubla dapat diakses 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu. Dengan adanya *downtime* tersebut mengakibatkan turunnya persentase kehandalan sistem Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Grafik III.3.3

Grafik III.3.3 Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut



Dalam suatu sistem yang handal harus memenuhi 4 prinsip yaitu :

- a) Ketersediaan (*availability*).
- b) Keamanan (*security*).
- c) Dapat dipelihara (*maintainability*).
- d) Integritas (*integrity*).

Untuk mendukung kehandalan sistem informasi dengan rutin melakukan pengetesan keamanan sistem, melakukan pemuktahiran teknologi, *updating* dan *patching software* dan system operasi, perawatan infrastruktur dan peningkatan kompetensi SDM.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 3) Ketiga (3) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3) pada Tahun 2022 terdapat target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 83% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 97,65% karena



terdapat peningkatan dimana Pengembangan Portal Hubla dan SIRANI sudah selesai dilaksanakan dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 dimana pencapaiannya telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 100% (sistem informasi melalui portal hubla.dephub.go.id dapat di akses 24 jam). Untuk mendukung kehandalan sistem informasi dilaksanakan kegiatan integrasi layanan perijinan Sistem Informasi Perhubungan Laut (SIHUBLA), pengembangan portal (*Website*) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan pembangunan Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Elektronik (SIRANI) sedangkan pada Tahun 2021 terdapat target sebesar 82% dan terealisasi sebesar 82% sehingga persentasenya sebesar 100%.

Tabel III.3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3)

IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	Target	82	85
				Realisasi	82	83
				Kinerja (%)	100	97,65

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 3) Ketiga (3) :

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Ketiga (3) "**Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut**" pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja 83% dari target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 85% sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 97,65% karena terdapat peningkatan dimana Pengembangan Portal Hubla dan SIRANI sudah selesai dilaksanakan dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 dimana pencapaiannya telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 100% (sistem informasi melalui portal hubla.dephub.go.id dapat di akses 24 jam). Untuk mendukung kehandalan sistem informasi dilaksanakan kegiatan integrasi layanan perijinan Sistem Informasi Perhubungan Laut (SIHUBLA), pengembangan portal (*Website*) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan pembangunan Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Elektronik (SIRANI).



Tabel III.3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
		TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.3 Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85	83	97,65

d. Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan

- 1) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan (IKK 4) Keempat (4) :**

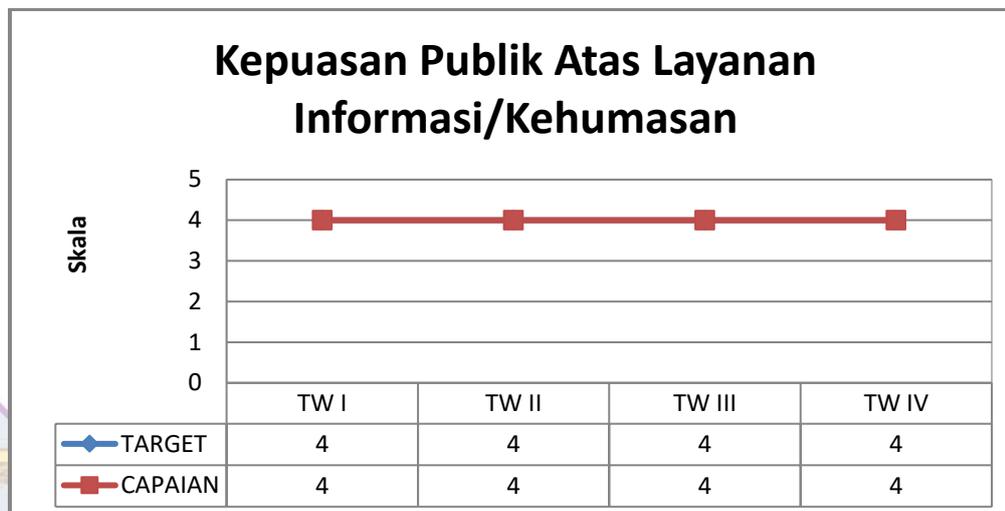
Tabel III.3.11 Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.4 Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	Skala	4	4	4	4	4	4	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 Indeks kepuasan publik sebesar 4 dengan nilai indeks maksimal sebesar 5. Terlihat pada Triwulan I, II, III dan IV tercapai hasil perhitungan pada Skala 4 dengan jumlah rata-rata responden 10 orang, sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan dalam mengakses permohonan informasi dan data terkini yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi.

Grafik III.3.4 Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan



2) **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan (IKK 4) Keempat (4) :**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4) pada Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pencapaiannya sesuai dengan target yg telah ditetapkan indeks sebesar 4 skala dengan jumlah rata-rata responden pada masing-masing Triwulan sebesar 10 orang, sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 dilakukan survey dengan kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Portal hubla.dephub.go.id terdapat realisasi sebesar 4 (empat) sehingga prosentasi capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel III.3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)

IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	%	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	%	Target	4	4
				Realisasi	4	4
				Kinerja (%)	100	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan (IKK 4) Keempat (4) :

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Keempat (4) "Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan" pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja 4 Skala sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 4 Skala sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi.

Tabel III.3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/ Kehumasan	Skala	4	4	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktota Jenderal Perhubungan Laut

e. Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut (IKK 5) Kelima (5) :

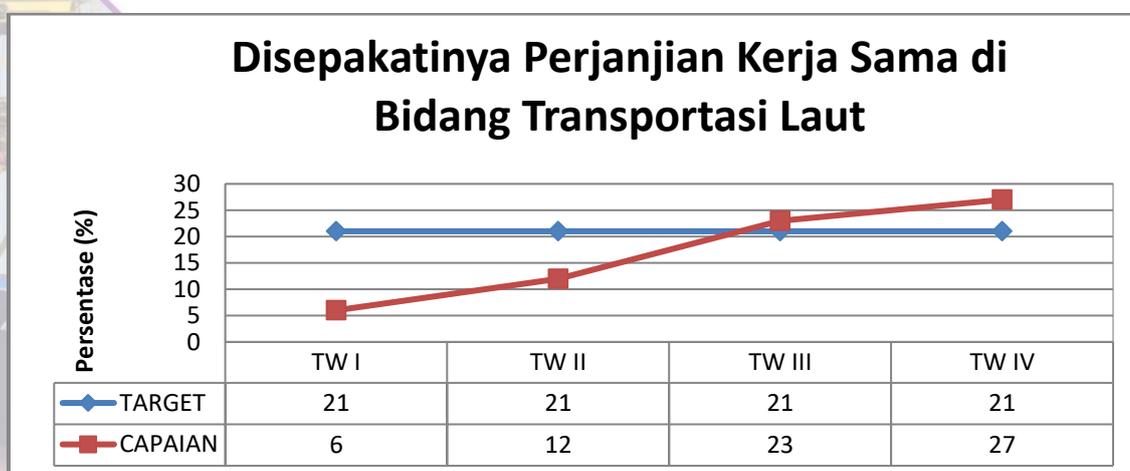
Tabel III.3.14 Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	21	6	12	23	27	27	128

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sebanyak 21 Perjanjian Kerja sama. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II terdapat realisasi sebesar 12 Perjanjian Kerja Sama sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 57.14%. Dan untuk Triwulan III terdapat realisasi sebesar 23 Perjanjian Kerja Sama sehingga pencapaian terhadap target 109% dikarenakan terdapat penambahan usulan 2 Perjanjian Kerjasama. Untuk Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 27 Perjanjian Kerja Sama sehingga terdapat target sebesar 128% sehingga melebihi target yang telah ditetapkan karena ada penambahan usulan 4 Perjanjian Kerjasama.

Grafik III.3.5 Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut



Adapun 27 Perjanjian Kerjasama yang sudah disepakati sebagai berikut :

- a) Perjanjian Kerahasiaan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Kantor Hukum SIP Law Firm Nomor HK.201/1/8/DJPL/2022 tanggal 18 Januari 2022;
- b) Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang dengan Universitas Maritim AMNI Semarang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi di Bidang Pelayaran Nomor HK.201/1/8/DNG.SMG/2022 dan 230/UNIMAR-AMNI/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;
- c) Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang dengan Politeknik Maritim Negeri Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi di Bidang Pelayaran Nomor HK.201/1/6/DNG.SMG/2022 dan 497/PL38/SF.04.03/2022 tanggal 10 Maret 2022;
- d) Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang dengan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Pendidikan, Penelitian, dan



Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi di Bidang Pelayaran Nomor HK.201/1/4/DNG.SMG/2022 dan 2180/UN7.5.3.2/KS/2022 tanggal 10 Maret 2022;

- e) Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang dengan Politeknik Bumi Akpelni tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi di Bidang Pelayaran Nomor HK.201/1/7/DNG.SMG/2022 dan 230/PBA/E.III/2022 tanggal 10 Maret 2022;
- f) Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi di Bidang Pelayaran Nomor HK.201/1/5/DNG.SMG/2022 dan HK.201/1/4/PIP.SMG-2022 tanggal 10 Maret 2022;
- g) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas Nomor HK.201/8/19/DJPL/2022 dan KS.02/7/4/1/HKHM/RH3/REG3-22 tanggal 7 April 2022;
- h) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu Nomor HK.201/8/20/DJPL/2022 dan KS.02/7/4/2/HKHM/RH3/REG3-22 tanggal 7 April 2022;
- i) Perjanjian Konsesi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui dengan PT. Bina Indo Raya Tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bino Indo Raya Nomor HK.201/1/1/UPP.Satui-2022 dan 008/PST/BIR-KUPP/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
- j) Perjanjian Konsesi antara KSOP Kelas I Banten dengan PT. Batu Alam Makmur tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Batu Alam Makmur Nomor 107/1/5/KSOP-BTN-2022 dan 003/BAM-KSOP/PK/IV/2022 tanggal 21 April 2022;
- k) Kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT. Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia tentang Pengembangan SDM Bidang Kepelabuhanan Nomor HK.201/9/5/DJPL/2022 dan MoU/002/V/D1-D1/PMLI-2 tanggal 30 Mei 2022;
- l) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat



LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum HAM dan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Kemenkes tentang Koordinasi Pelayanan Kepabeanan(*Customs*), Keimigrasian (*Immigration*), Karantina Kesehatan (*Health Quarantine*) Dan Kepelabuhanan (*Port*) Atau *CIQP* Di Pelabuhan Indonesia Nomor HK.201/9/16/DJPL/2022 tanggal 29 Juni 2022;

- m) Perjanjian konsesi antara Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun dengan PT Asinusa Putra Sekawan tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Area Kegiatan berlabuh Jangkar (Anchorage Area) dan Alih Muat Barang dari kapal ke Kapal (Ship to Ship Transfer) di wilayah perairan Pulau Nipa Nomor HK.201/1/2/KSOP.TBK-2022 dan 013/PKS-ASN/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022;
- n) Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan Ditjen Hubla Kemenhub dengan BUP PT Pelabuhan Penajam Banua Taka tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada terminal PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka di Pelabuhan Balikpapan Nomor HK.201/1/3/KSOP.BPN-2022 dan 023/LGL/PPBT/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022;
- o) Perjanjian Konsesi antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa Nomor HK.701/86/VII/UPP.RI-2022 dan 001/BNJMP-KUPPRI/IV/2022 tanggal 13 Juli 2022;
- p) Perjanjian kerjasama antara Ditjen Hubla dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut tentang Pelaksanaan Pelatihan pandu Tk II angkatan LI Tahun 2022 Nomor HK.201/1/5/DP-22 dan HK.201/161/1/BPPTL-2022 tanggal 2 Agustus 2022;
- q) Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia tentang Pelaksanaan Pengukuhan Sertifikat (Endorsement) Pandu Nomor HK.201/1/4/DP-22 dan SPJ/003/VIII/PMLI-22 tanggal 2 Agustus 2022;
- r) Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia tentang Pelaksanaan Pelatihan Pandu Tingkat I Nomor HK.201/1/2/DP-22 dan SPJ/001/VIII/PMLI-22 tanggal 2 Agustus 2022;
- s) Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia tentang Pelaksanaan Pelatihan Pandu Tingkat II Nomor HK.201/1/1/DP-22 dan SPJ/002/VIII/PMLI-22 tanggal 2 Agustus 2022;



- t) Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia tentang Pelatihan Pandu Laut Dalam Nomor HK.201/1/3/DP-22 dan SPJ/004/VIII/PMLI-22 tanggal 2 Agustus 2022;
- u) Perjanjian hibah antara Pemerintah kabupaten Pulang Pisau dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Kepada Ditjen Hubla untuk Pembangunan Pelabuhan Nomor HK.201/11/11/DJPL/2022 dan 49/NPHD/SETDA-BPPKAD/PP/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
- v) Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan dengan PT. Lestari Samudra Sakti tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal PT. Lestari Samudera Sakti Nomor HK.201/1/5/KSOP.BPN-2022 dan 049/LSS-KSOP/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- w) Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan BUP PT. Ambang Barito Nusapersada tentang Pengusahaan dan Pengelolaan Alur-Pelayaran Ambang Sungai Barito Kalimantan Selatan Nomor HK.201/01/02/KSOP.BJM-2022 dan KS.02/20/9/1/OPEA/DIRA/ABNP-22 tanggal 20 September 2022;
- x) Perjanjian Kerjasama antara Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pemanfaatan Pengoperasian Stasiun Vessel Traffic Service (VTS) Center Batam Milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.201/1/13/DNG.TPI-2022 dan HK.301/21/10/1/DPUK/BTAM/PLJM-22 tanggal 21 Oktober 2022;
- y) Perjanjian Kerjasama antara Pusat Riset Elektronika Organisasi Riset Elektronika dan Informatika Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Distrik Navigasi Kelas II Tanjung Emas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tentang Riset dan Inovasi Sistem Cerdas pada Sarana Bantu Navigasi Pelayanan (SBNP) untuk Mendukung Keselamatan Pelayaran Nomor 170/V/KS/10/2022 dan Hk.201/1/16/DNG.SMG/2022 tanggal 27 Oktober 2022;
- z) Nota Kesepahaman antara Organisasi Riset Elektronika dan Informatika Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tentang Riset dan Inovasi Teknologi Elektronika dan Informatika Untuk Aplikasi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Serta Perlindungan Lingkungan



Maritim Nomor 19/III/KS/11/2022 dan HK.201/15/5/DJPL/2022 tanggal 9 November 2022;

- aa) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan PT. Bank Mandiri (Persero tbk) tentang Fasilitas Pembayaran Penghasilan Pegawai Nomor HK.201/15/13/DJPL/2022 dan Nomor DIR.PKS/49/2022 Tanggal 21 November 2022.

Adapun Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses pembahasan sebagai berikut :

- a) Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Taman Nasional Komodo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Distrik Navigasi Kelas II Kupang Kemenhub tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Penempatan Rambu Pelabuhan Di Pulau Rintja dan Pulau Padar di Kawasan Taman Nasional Komodo;
- b) Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Kawasan Pesisir dan Pelabuhan di Jakarta Utara;
- c) Perjanjian Kerja anantara PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Tanjung Priok dengan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), Pangkalan Pejagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok dan KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu tentang Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap Berupa Lahan Hak Pengelolaan (HPL) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Tanjung Priok;
- d) Perjanjian Kerja antara PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Tanjung Priok dengan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok tentang Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap Berupa Lahan Hak Pengelolaan (HPL) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Tanjung Priok.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut (IKK5) Kelima (5) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5) pada Tahun 2022 terdapat realisasi sebanyak 27 perjanjian sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 128% Sedangkan Tahun 2021 mencapai 27 Perjanjian dan mencapai persentase sebesar 225%, sehingga melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 ada penambahan usulan 6 Perjanjian Kerjasama.



Tabel III.3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)

IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	Target	12	21
				Realisasi	27	27
				Kinerja (%)	225	128

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut (IKK 5) Kelima (5)**

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kelima (5) "Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama di Bidang Transportasi Laut" pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja 27 sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 21 sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 128%, sehingga melebihi target yang telah ditetapkan karena ada penambahan usulan 6 Perjanjian Kerjasama.

Tabel III.3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	21	27	128

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



f. Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 6) Keenam (6) :

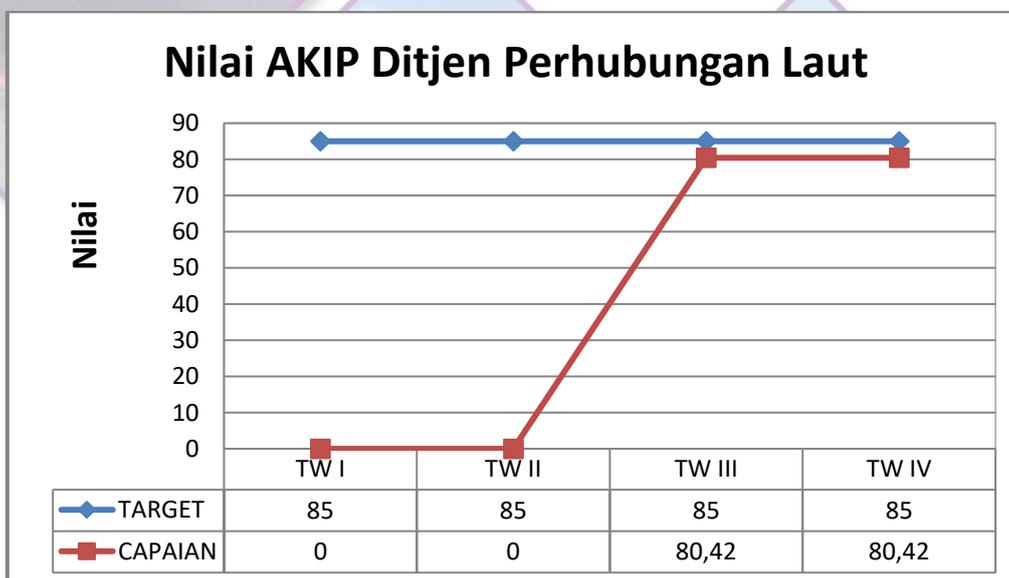
Tabel III.3.17 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	0	0	80,42	80,42	80,42	94,61

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Untuk Tahun 2022 target dari Nilai AKIP sebesar 85 Nilai. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II tidak terdapat realisasi karena belum ada Evaluasi Penilaian dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Pada Triwulan III dan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 80,42 sehingga prosentase Kinerja sebesar 94,61%.

Grafik III.3.6 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut



Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 yang meliputi Komponen/Sub Komponen/Kriteria sebagai berikut:



**Tabel III.3.18 Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021**

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	24,30
2.	Pengukuran Kinerja	23,14
3.	Pelaporan Kinerja	12,47
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,50
5.	Capaian Kinerja	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	80,42
	Predikat	A (Sangat Baik)

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 6) Keenam (6):

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6) pada Tahun 2022 telah menerima hasil evaluasi Dokumen SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan nilai sebesar 80,42, sehingga prosentase Kinerja sebesar 94,61% sedangkan pada Tahun 2021 mendapatkan Nilai sebesar 75,92 sehingga mengalami kenaikan dari Nilai tahun sebelumnya

**Tabel III.3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022
dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)**

IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Target	85	85
				Realisasi	75,92	80,42
				Kinerja (%)	89,32	94,61

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 6) Keenam (6) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6) pada Tahun 2022 telah menerima hasil evaluasi Dokumen SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan nilai sebesar 80,42, sehingga prosentase Kinerja sebesar 94,61%.



Tabel III.3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	80,42	94,61

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

g. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 7)

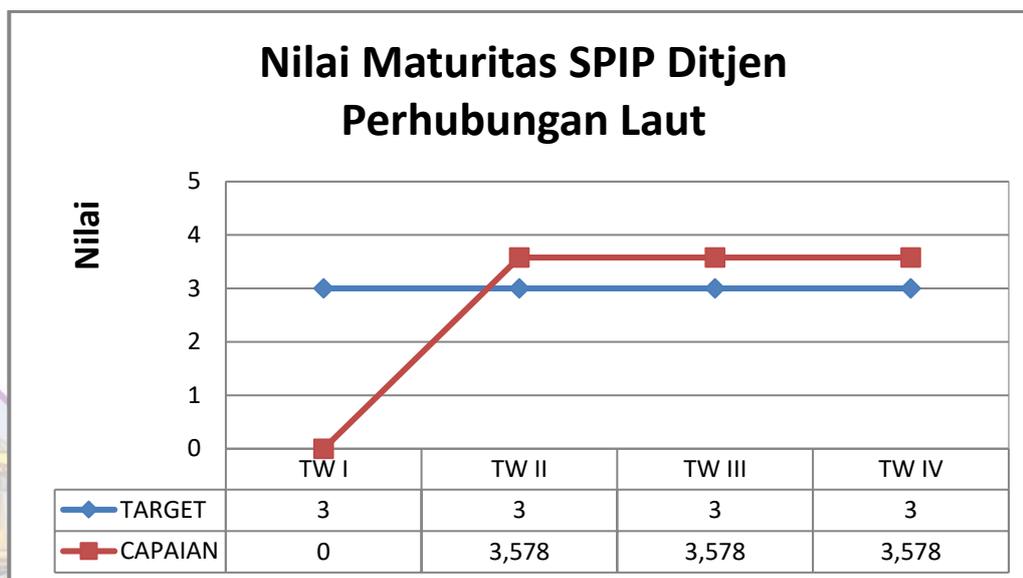
Tabel III.3.21 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	0	3,578	3,578	3,578	3,578	119,26

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Untuk Tahun 2022 target dari Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut sebesar 3 Nilai. Terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena belum ada evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Sedangkan pada Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV terdapat Realisasi Nilai Maturitas SPIP sebesar 3,578 pertanggal 30 Juni 2022 yang tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Nomor KP. 904/2/9 Phb 2022 Perihal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2021/2022, sehingga Persentase Kinerja sebesar 119,26%.

Grafik III.3.7 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut



2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7) pada Tahun 2022 terdapat realisasi sebesar 3,578 terhadap target kinerja Tahun 2022 sebesar 3 pertanggal 30 Juni 2022 yang tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Nomor KP. 904/2/9 Phb 2022 Perihal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022, sehingga Persentase Kinerja sebesar 119,26%, sedangkan pada Tahun 2021 Terdapat Realisasi Sebesar 2,96% di Bulan November sehingga prosentase yang di dapat sebesar 98,67.

Tabel III.3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)

IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Target	3	3
				Realisasi	2,96	3,578
				Kinerja (%)	98,67	119,26

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 7)**

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Ketujuh (7) "Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut" pada Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan Nilai Maturitas SPIP sebesar 3,578 Nilai sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 3 Nilai pertanggal 30 Juni 2022 yang tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Nomor KP. 904/2/9 Phb 2022 Perihal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022, sehingga Persentase Kinerja sebesar 119,26% dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	3,578	119,26

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

h. Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut.

1) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut (IKK 8)**

Tabel III.3.24 Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	98,24	13,55	36,70	58,57	97,38	97,38	99,12

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Sesuai dengan Nota Dinas dari Bagian Keuangan nomor 43/BK/III/2022 tanggal 9 Februari 2022 hal Usulan Perubahan Target Indikator Kinerja Bagian Keuangan pada Perjanjian Kinerja Bagian Keuangan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdapat perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8: Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut dari 97,17% menjadi 98,24% hal ini dikarenakan adanya sisa dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan karena menyesuaikan turunnya prognosa Kementerian Perhubungan yang mengakibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menurunkan persentase target IKK tahun 2022.

Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi anggaran sebesar 13,55%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 31 Maret 2022 yang diakses pada tanggal 14 Desember 2022, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 14,07%.

Pada Triwulan II sebesar 36,70%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 30 Juni 2022 yang diakses pada tanggal 14 Desember 2022, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 38,11%.

Pada Triwulan III sebesar 58,57%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 30 September 2022 yang diakses pada tanggal 14 Desember 2022, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 60,82%.

Pada Triwulan IV terdapat perubahan target dari sebelumnya 96,30% menjadi 98,24% dengan data dukung Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan Nomor 14/BK/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Usulan Perubahan Indikator Kinerja 8 Pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022, berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 31 Desember 2022 yang diakses pada tanggal 5 Januari 2023 terdapat realisasi sebesar 97,38%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 99,12%.

Prognosa Tahun Anggaran 2022 sebesar 98,24% yang didapat dari perhitungan akhir dengan memperhatikan adanya beberapa faktor, antara lain:

- a) Adanya sisa belanja pegawai sebesar Rp35.735.518.212,00;
- b) Adanya sisa belanja barang sebesar Rp21.876.529.140,00 yang terdiri dari sumber dana rupiah murni sebesar Rp13.249.970.257,00 yang merupakan sisa belanja barang operasional (Perjadin, Pemeliharaan, ATK, dll) tersebar di 302 satker, sumber dana PNBPNP sebesar Rp7.625.517.585,00 yang merupakan sisa belanja barang non



operasional (Perawatan Gedung Kantor , Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dll) tersebar di 302 satker, sumber dana BLU sebesar Rp1.001.041.299,00;

- c) Adanya sisa belanja modal sebesar Rp105.870.868.469,00 dari rupiah murni sebesar Rp5.886.676.240,00 yang tersebar di 302 satuan kerja, potensi PHLN KSOP Patimban tidak terserap sebesar Rp32.322.732.631,00 dan SBSN senilai Rp54.200.254.069,00 (Sisa Kontrak kegiatan pembangunan kapal patroli 46 Miliar, SBSN KSOP Patimban 3,7 Miliar dan kegiatan pembangunan fasilitas Dermaga Tanjung Ular 2,3 Miliar), sumber dana PNPB sebesar Rp13.266.445.529,00, dan BLU sebesar Rp194.760.000,00.

Justifikasi realisasi belum terserap sebesar 98,24% karena beberapa faktor, antara lain adanya beberapa satuan kerja yang realisasi belanjanya masih di bawah 80% (posisi 11 Desember 2022 dengan data yang bersumber dari SPAN Kemenkeu):

- a) Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat terserap 75,62% dari prognosa 99,76% meliputi Angkutan Barang Tol Laut, Pelayanan Angkutan Kapal Ternak Mekanisme Penugasan dan Swasta, Penyelenggaraan pelayanan Angkutan Laut Perintis Pelni, Subsidi Pengoperasian Kapal Rede Angkutan Perairan Pelabuhan, dan Bank Garansi;
- b) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban terserap 27,85% dari prognosa 96,25% meliputi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban Phase I-1 1 Paket Rp. 64.451.241.035,-, Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban Phase 1-2 1 Paket Rp. 621.079.120.000,-, Pembangunan Fasilitas Pendukung Back Up Area Pelabuhan Patimban SBSN Rp. 43.800.904.070,-, Pengadaan Lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh LMAN Rp. 71.681.240.000,-, Belanja Pegawai dan Belanja Barang Opr/Non Opr dan Belanja Modal Lainnya Rp. 5.504.509.614, dan Bank Garansi;
- c) Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat terserap 78,13% dari prognosa 99,59% yang merupakan Rehabilitation and Reconstruction of Port Facilities in Pantoloan, Donggala, and Wani dan Studi Kepelabuhanan;
- d) Unit Penyelenggara Pelabuhan Tual terserap 78,73% dari prognosa 98,85% yang merupakan Kegiatan Perintis Swasta, Pengembangan Faspel Laut Tual, Pelebaran Dermaga Dan Trestel Pelabuhan Tual, dan Bank Garansi;
- e) Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai terserap 46,49% dari prognosa 63,83% yang merupakan Pengadaan, Perizinan, dan Distribusi Senjata Api serta Amunisi Rp8.000.0000.000,00, Pembangunan Kapal Patroli Kelas III Aluminium SBSN (MYC 2022-2023) Rp56.440.000.000,00, Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV Aluminium (MYC 2021- 2022 dan 2022-2023) Rp14.130.000.000,00, Pembangunan



LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

Kapal Patroli Kelas V Aluminium (MYC 2021-2022) sudah 100 %, dan Belanja Barang Operasional dan Non Operasional Rp8.532.379.481,00;

- f) Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat terserap 70,61% dari prognosa 92,57% berupa Consultant Services Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON), Project Pengadaan Boat Survey (2 unit), Pengembangan Sistem Informasi Telekomunikasi Pelayaran Terintegrasi, Terdapat penambahan pagu Hibah Luar Negeri Rp.17.651.866.000,00;
- g) Unit Penyelenggara Pelabuhan Saumlaki terserap 67,33% dari prognosa 95,50% berupa Kegiatan Perintis Swasta dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Saumlaki; Bank Garansi;
- h) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wanci terserap 75,97% dari prognosa 99,31% berupa Perkuatan Dermaga Pelabuhan Wanci; Bank Garansi;
- i) Unit Penyelenggara Pelabuhan Wonoreli terserap 76,67% dari prognosa 98,75% berupa Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Ilwaki;
- j) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Semboja terserap 69,13% dari prognosa 98,90% berupa Rehab Faspel Laut Ambarawang;
- k) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muntok terserap 74,74% dari prognosa 91,68% berupa Pemb. Faspel Tanjung Ular; Bank Garansi;
- l) Unit Penyelenggara Pelabuhan Likupang terserap 75,25% dari prognosa 98,72% berupa Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Likupang; Bank Garansi;
- m) Unit Penyelenggara Pelabuhan Waren terserap 49,07% dari prognosa 99,57% berupa Pemb. Fasilitas Darat Pelabuhan Waren; Bank Garansi;
- n) Unit Penyelenggara Pelabuhan Bulu Kumba terserap 75,06% dari prognosa Pemb. Faspel Laut Kajang (MYC 2022-2023);
- o) Unit Penyelenggara Pelabuhan Bade terserap 58,39% dari prognosa Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Mur; Bank Garansi;
- p) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kepulauan Seribu terserap 75,36% dari prognosa 97,00% berupa Dukungan Manajemen Rutin;
- q) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Raja Ampat terserap 77,68% dari prognosa 94,43% berupa Dukungan Manajemen Rutin (Penambahan Pagu BBM);
- r) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Namrole terserap 77,22% dari prognosa 98,00% berupa Dukungan Manajemen Rutin.

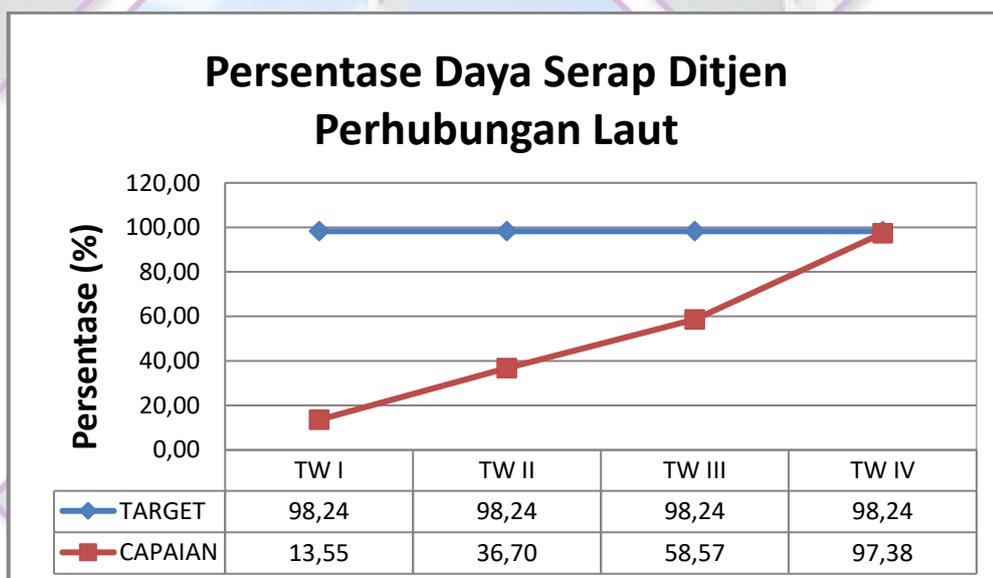


Adapun realisasi bulanan dibandingkan dengan target adalah sebagai berikut :

Tabel III.3.25 Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut Perbulan

IKK 8: Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut					
Satuan	Target 2022	Perbandingan Target dan Realisasi Bulanan			
		Bulan	Target	Realisasi	Kinerja
%	98,24	Januari	2,28	2,54	111,40%
		Februari	3,93	5,3	134,86%
		Maret	3,91	5,71	146,04%
		April	10,03	9,86	98,31%
		Mei	4,15	5,57	134,22%
		Juni	8,40	7,72	91,90%
		Juli	6,31	7,27	115,21%
		Agustus	8,09	7,39	91,35%
		September	8,99	7,21	80,20%
		Oktober	12,21	8,54	69,94%
		November	14,20	7,86	55,35%
		Desember	15,74	22,41	142,38%

Grafik III.3.8 Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut





Selama Tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengalami revisi anggaran sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

a) Revisi 1:

Blokir *Automatic Adjustment*:

- Dari total pagu pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp135.510.660.000,00, pagu tunjangan kinerja sebesar Rp66.537.298.000,00 mengalami blokir dalam rangka *automatic adjustment*;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyesuaian Ijazah tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana tahap I di Bagian Kepegawaian sebesar Rp418.950.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- Terdapat blokir pada kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp2.593.000.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- Terdapat blokir pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas (Kendaraan roda 2 sebesar Rp775.925.000,00 dan Kendaraan operasional sebesar Rp2.327.808.000);
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Renja KL melalui Aplikasi SAKTI dan *E-Planning* beserta *tagging* Kegiatan PN, Kegiatan Strategis, Padat Karya pada rangkaian pagu alokasi anggaran DJPL-Bagian Perencanaan sebesar Rp700.245.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan-Bagian Perencanaan sebesar Rp450.156.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi dalam rangka Pemutakhiran Data PNBP Semester II-Bagian Keuangan sebesar Rp722.988.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan *Updating* Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT-Bagian Keuangan sebesar Rp538.650.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Ekstern (BPK-RI, BPKP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp206.400.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Bagian Perencanaan sebesar Rp323.190.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Peliputan dan Pemantauan Opini Publik Pelayanan Angkutan Laut-Bagian Organisasi dan Humas sebesar Rp394.380.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyelenggaraan Pertemuan Bilateral Bidang Maritim-Bagian Hukum dan KSLN sebesar Rp104.352.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyelenggaraan *Workshop* Teknik Diplomasi-Bagian Hukum dan KSLN sebesar Rp32.620.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Koordinasi dengan Instansi lain di Bidang Hukum dan Pelayaran-Bagian Hukum dan KSLN sebesar Rp293.735.000;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah-Bagian Hukum dan KSL sebesar Rp105.119.000,00.

b) Revisi 2



Terdapat perubahan *Automatic Adjustment* dari revisi menjadi:

- Terdapat blokir pada kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp2.564.640.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Renja KL melalui Aplikasi SAKTI dan E-Planning beserta tagging Kegiatan PN, Kegiatan Strategis, Padat Karya pada rangkaian pagu alokasi anggaran DJPL-Bagian Perencanaan sebesar Rp153.960.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Bahan Kebijakan Pimpinan-Bagian Perencanaan sebesar Rp1.092.339.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi dalam rangka Pemutakhiran Data PNBP Semester II-Bagian Keuangan sebesar Rp2.287.269.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT-Bagian Keuangan sebesar Rp669.150.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- Terdapat blokir pada kegiatan Koordinasi dengan Instansi lain di Bidang Hukum dan Pelayaran-Bagian Hukum dan KSLN sebesar Rp274.961.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah-Bagian Hukum dan KSL sebesar Rp66.648.000,00.

c) Revisi 3

Automatic Adjustment Tahap 2 (Belanja Barang)

- Terdapat blokir pada kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp1.824.840.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- Terdapat blokir pada kegiatan Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT-Bagian Keuangan sebesar Rp519.500.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Bagian Perencanaan sebesar Rp466.830.000,00.

d) Revisi 4

Terdapat perubahan sebagai berikut:

- Penyesuaian RPD (Rencana Penarikan Dana) di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- Terdapat blokir pada Tunjangan Kinerja sebesar Rp75.806.594.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT-Bagian Keuangan sebesar Rp1.955.900.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- Terdapat perubahan anggaran pada Studi/Kajian dari Rp29.670.162.000,00 menjadi Rp28.322.155.000,00;
- Terdapat perubahan anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp359.935.419.000,00 menjadi Rp357.526.778.000,00.



e) Revisi 5

- Pergeseran Belanja Pegawai ke Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
- Terdapat blokir pada kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Eselon II (4 Unit) sebesar Rp4.286.372.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Pra Studi Kelayakan (Pra Feasibility Study) Pembangunan Pelabuhan pada 15 Lokasi-Bagian Perencanaan sebesar Rp9.063.665.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Patimban sebesar Rp6.693.943.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan UTP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Bagian Organisasi dan Humas sebesar Rp286.300.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur- Bagian Organisasi dan Humas sebesar Rp154.000.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Pelaksanaan Proses Pemberkasan Kenaikan Pangkat Terpadu-Bagian Kepegawaian sebesar Rp210.700.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi dan Pendataan Diklat Pegawai DJPL-Bagian Kepegawaian sebesar Rp196.800.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan DJPL-Bagian Kepegawaian sebesar Rp91.000.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan/Pembahasan Pola Mutasi di Lingkungan Ditjen Hubla sebesar Rp172.000.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Pemeriksaan dan Penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil- Bagian Kepegawaian sebesar Rp358.500.000,00;
- Terdapat blokir pada Kegiatan Penyusunan Aplikasi E-Lapkin TA 2021 di Lingkungan DJPL-Bagian Kepegawaian sebesar Rp342.342.000,00;
- Terdapat blokir pada Kegiatan Penyusunan Tanda Penghargaan Satya Lancana Karya Satya X,XX, dan XXX tahun di Lingkungan DJPL- Bagian Kepegawaian sebesar Rp271.800.000,00
- Terdapat blokir pada Kegiatan Pengadaan Tenaga Pendukung Dalam Rangka Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Umum Dan Perlengkapan Sebesar Rp500.000.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Renja KL melalui Aplikasi SAKTI dan E-Planning beserta tagging Kegiatan PN, Kegiatan Strategis, Padat Karya pada rangkaian pagu alokasi anggaran DJPL-Bagian Perencanaan sebesar Rp1.091.576.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Bagian Perencanaan sebesar Rp1.049.510.000,00;
- Terdapat blokir pada Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Strategis dan Direktif Pimpinan Ditjen Perhubungan Laut - Bagian Perencanaan Rp582.400.000,00;
- Penyusunan Program Kerja dan Perencanaan Kegiatan Pada Bagian Kepegawaian - Bag. Kepegawaian 307.500.000;



LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

- Penyusunan Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Perencanaan Rp413.712.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi dalam rangka Pemutakhiran Data PNBP Semester II-Bagian Keuangan sebesar Rp 2.355.247.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Aparat Fungsional Intern (Itjen) Dan Monitoring TP/TGR - Bag. Keuangan sebesar Rp140.000.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran - Bag. Keuangan sebesar Rp1.355.968.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Pendataan / Perhitungan SPT Tahunan Pegawai Kantor Pusat - Bag. Keuangan sebesar Rp50.000.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Ekstern (BPK-RI, BPKP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp824.417.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Bagian Perencanaan sebesar Rp1.192.338.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Dinas Jabatan - Bag. Umum Dan Perlengkapan sebesar Rp500.000.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Bimtek Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkip), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dan Aplikasi Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Perencanaan sebesar Rp1.006.128.000,00;
- Terdapat blokir pada Kegiatan Updating Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Perencanaan sebesar Rp739.800.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyiapan Bahan Laporan Analisa Dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 - Bag. Perencanaan sebesar Rp370.080.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Dokumen Lanjutan Penetapan Pssa Selat Lombok - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp1.232.339.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas sebesar Rp892.839.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Di Bidang Transportasi Laut Di Lingkungan Ditjen Hubla Wilayah Barat - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp151.589.000;
- Terdapat blokir pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya di Bidang Transportasi Laut - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp144.930.000
- Terdapat blokir pada kegiatan Koordinasi dengan Instansi lain di Bidang Hukum dan Pelayaran-Bagian Hukum dan KSLN sebesar Rp424.961.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan / Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah - Bag. Hukum Dan KSLN sebesar Rp66.648.000;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan / Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp1.084.352.000.



f) Revisi 6

Penghapusan Hal.IV B untuk kegiatan IT yang terdiri dari Belanja Barang Non Operasional Lainnya:

- Pemeliharaan Portal Hubla senilai Rp200.000.000,00 dihapus sebesar Rp191.300.000,00;
- Pemeliharaan Server Eksisting Tahun 2022 senilai Rp200.000.000,00 dihapus sebesar Rp191.300.000,00;
- Pemeliharaan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi senilai Rp200.000.000,00 dihapus sebesar Rp191.300.000,00;
- Pemeliharaan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi senilai Rp900.000.000,00 dihapus sebesar Rp881.800.000,00.

g) Revisi 7

- Terdapat blokir pada pra Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Pada 14 Lokasi Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Daya Serap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut senilai Rp8.914.878.000;
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan UPT Ditjen Hubla - Bag. Organisasi dan Humas (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota-Hotel) sebesar Rp50.000.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur UPT - Bag. Organisasi dan Humas (Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Transport) sebesar Rp50.000.000,00
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyesuaian Ijazah tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana tahap I di Bagian Kepegawaian sebesar Rp300.000.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (penginapan);
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi dan Pendataan Diklat Pegawai DJPL- Bagian Kepegawaian sebesar Rp183.680.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan DJPL-Bagian Kepegawaian sebesar Rp141.000.000,00 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Penginapan);
- Terdapat blokir pada Kegiatan Penyusunan Aplikasi E-Lapkin TA 2021 di Lingkungan DJPL-Bagian Kepegawaian sebesar Rp350.900.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penginapan);
- Terdapat blokir pada Kegiatan Penyusunan Tanda Penghargaan Satya Lancana Karya Satya X,XX, dan XXX tahun di Lingkungan DJPL- Bagian Kepegawaian sebesar Rp 266.760.000,00 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Penginapan);
- Terdapat blokir pada kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp1.200.000.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- Terdapat blokir pada kegiatan Layanan Perkantoran Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja- Tunjangan Kinerja) sebesar Rp84.406.743.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Renja K/L Melalui Aplikasi Sakti dan E-Planning Beserta Taging Kegiatan PN, Kegiatan Strategis, Padat Karya pada Rangkaian Pagu Alokasi Anggaran DJPL-Bagian Perencanaan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penginapan/ Uang Harian/ Transportasi) sebesar



LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

Rp1.499.734.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Meeting Fullboard Tahap I) sebesar Rp100.000.000,00;

- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Bagian Perencanaan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penginapan/Uang Harian/ Transportasi) sebesar Rp 652.003.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penginapan / Uang Harian) sebesar Rp624.158.000,00;
- Terdapat blokir pada Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Strategis dan Direktif Pimpinan Ditjen Perhubungan Laut - Bagian Perencanaan Rp333.017.000,00;
- Terdapat blokir pada Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Perencanaan Kegiatan Pada Bagian Kepegawaian - Bag. Kepegawaian Rp 255.512.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Evaluasi dalam rangka Pemutakhiran Data PNBP Semester II-Bagian Keuangan Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp 67.978.000,00 dan Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp2.287.269.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Monitoring Dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Aparat Fungsional Intern (Itjen) dan Monitoring TP/TGR - Bag. Keuangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (penginapan) sebesar Rp130.000.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT-Bagian Keuangan sebesar Rp1.892.211.000,00 yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran - Bag. Keuangan Belanja Bahan (ATK) sebesar Rp60.818.000,00 dan Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp2.656.839.000,00;
- Terdapat blokir pada Kegiatan Updating Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Perencanaan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Transportas/ Uang Harian/ Penginapan) sebesar Rp 443.880.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transportas/ Uang Harian/ Penginapan) sebesar Rp1.269.698.000,00;
- Terdapat blokir pada Kegiatan Bimtek Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aplikasi Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Perencanaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Fullboard) sebesar Rp785.992.000,00;
- Terdapat blokir pada Kegiatan Updating Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Bag. Perencanaan sebesar Rp493.600.000,00;
- Terdapat blokir pada Kegiatan Penyiapan Bahan Laporan Analisa dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 - Bag. Perencanaan sebesar Rp50.000.000,00;
- Terdapat blokir pada Kegiatan Webinar Internasional Peringatan Hari Perhubungan Nasional - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp104.352.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas sebesar Rp 277.086.000,00;



- Terdapat blokir pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan di Bidang Transportasi Laut Di Lingkungan Ditjen Hubla Wilayah Barat - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp 85.000.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya di Bidang Transportasi Laut - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp50.000.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan / Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri - Bag. Hukum dan KSLN sebesar Rp1.630.808.375,00.

h) Revisi 8

- Terdapat blokir pada kegiatan Layanan Perkantoran berupa tunjangan kinerja sebesar Rp83.506.743.000;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran - Bag. Keuangan Belanja Bahan (ATK) sebesar Rp 80.818.000,00;
- Terdapat blokir pada kegiatan Penyusunan Dokumen Lanjutan Penetapan PSSA Selat Lombok - Bag. Hukum dan KSLN berupa Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp3.000.000,00, honor pokja sebesar Rp 2.730.000, dan Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp1.226.609.000.

i) Revisi 9

- Terdapat blokir pada kegiatan Layanan Perkantoran berupa tunjangan kinerja sebesar Rp58.366.733.000.

j) Revisi 10

- Tidak ada tambahan blokir.

k) Revisi 11

- Terdapat blokir pada kegiatan Layanan Perkantoran berupa tunjangan kinerja sebesar Rp50.975.597.000.

l) Revisi 12

- Tidak ada tambahan blokir.

m) Revisi 13

- Terdapat blokir pada kegiatan Layanan Perkantoran berupa tunjangan kinerja sebesar Rp50.415.897.573.\

n) Revisi 14

- Sudah tidak terdapat kegiatan yang diblokir.



Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Daya Serap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai berikut :

- a) Melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala, RPD adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang dituangkan dalam DIPA, dengan penyusunan RPD secara berkala dan terpantau, diharapkan daya serap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat meningkat;
- b) Melakukan monitoring realisasi pelaksanaan anggaran agar pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat sesuai dengan perencanaan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut (IKK 8) Kedelapan (8) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8) pada Tahun 2022 Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut posisi 31 desember 2022 (*unaudited*) yang diakses pada tanggal 5 Januari 2023)) realisasi anggaran sebesar 97,38% sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 99,12% dan belum mencapai dari target yang telah di tetapkan karena adanya Optimalisasi Penyerapan Anggaran UPT/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut sehingga melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan pada Tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 96,29% sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 102,46%

Tabel III.3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8)

IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	Target	93,98	98,24
				Realisasi	96,29	97,38
				Kinerja (%)	102,46	99,12

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut (IKK 8) Kedelapan (8) :**

Indikator Kinerja (IKK) Kedelapan (8) ”**Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut**” pada Tahun 2022 Daya Serap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Posisi 5 Januari 2023) realisasi anggaran sebesar 97,38% sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 99,12% dan belum mencapai dari target yang telah ditetapkan karena adanya Optimalisasi Penyerapan Anggaran UPT/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut.

Tabel III.3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	98,24	97,38	99,12

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

i. **Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut.**

1) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut (IKK 9) Kesembilan (9) :**

Tabel III.3.28 Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Konsep Peraturan	14	5	8	11	14	14	100%

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Adapun sesuai dengan target Tahun 2022 sebanyak 14 Peraturan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 5 Rancangan Peraturan Menteri dan pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 3 Rancangan Peraturan Menteri. Sehingga prosentase pencapaiannya sebesar 57,14% belum mencapai target yang telah ditetapkan karena masih dalam proses penyusunan.

Adapun pada Triwulan I dan II sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kelaiklautan Dan Operasional Kapal Penumpang Di Bawah Permukaan Air (*Passenger Submersible Craft*) Berbendera Indonesia;
- b) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kemudahan Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing Dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia;
- c) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kelaiklautan dan Pengoperasian Kapal Selam Penumpang Berbendera Indonesia;
- d) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kelaiklautan Kapal Bersayap Dengan Efek Permukaan (*Wing In Ground Effect Craft*) Berbendera Indonesia;
- e) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non Convention Vessel Standart*) Berbendera Indonesia;
- f) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi;
- g) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kelaiklautan Kapal Bersayap Dengan Efek Permukaan (*Wing In Ground Effect Craft*) Berbendera Indonesia;
- h) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif;

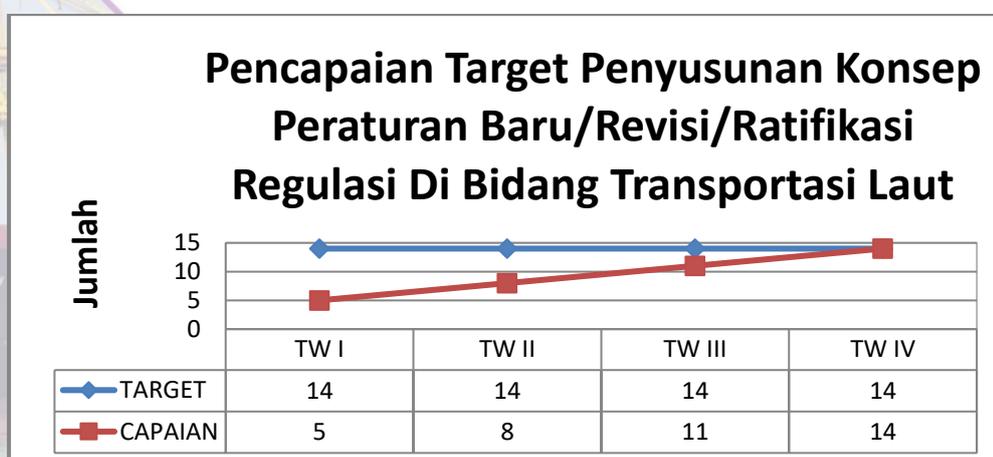
Pada Triwulan III dan IV sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan. Adapun 6 Peraturan Perundang-undangan yang masih dalam proses penyusunan tersebut antara lain :

- a) Pembahasan Rancangan Keputusan Dirjen Hubla tentang Petunjuk Teknis Sim KPLP;
- b) Pembahasan Rancangan Keputusan Dirjen Hubla tentang Dokumen Panduan Buku Nasional mengenai Pengawasan Kepatuhan dan Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Pengendalian Sistem Antiteritip (*Anti Pouling System*) dan Sistem Manajemen Air balas (*Ballast Water Manajemen System*) oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (FSI) / Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) di Indonesia;
- c) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2015 Tentang Pemberian

Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing;

- d) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia;
- e) Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Bidang Kenavigasian Oleh Pemerintah Dan Badan Usaha;
- f) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa Di Laut Berserta Amandemennya.

Grafik III.3.9 Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/ Revisi/ Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut



2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut (IKK 9) Kesembilan (9) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9) pada Tahun 2022 terdapat target sebesar 14 Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi dan terealisasi sebesar 14 dokumen capai target yang telah di tetapkan sedangkan pada Tahun 2021 terdapat target sebesar 10 Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi dan terealisasi sebesar 23 Dokumen sehingga persentase terhadap target sebesar 230%.



Tabel III.3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9)

IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Pencapaian Target	Jumlah	Pencapaian Target	Konsep	Target	10	14
Penyusunan Konsep		Penyusunan Konsep	Peraturan	Realisasi	23	14
Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi		Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi		Kinerja (%)	230	100
Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Regulasi di Bidang Transportasi Laut				

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut (IKK 9) Kesembilan (9) :

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kesembilan (9) "**Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut**" pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja 23 Jumlah Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 14 Jumlah Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Tabel III.3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	%	14	14	100

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

j. Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla (IKK 10)

Tabel III.3.31 Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN

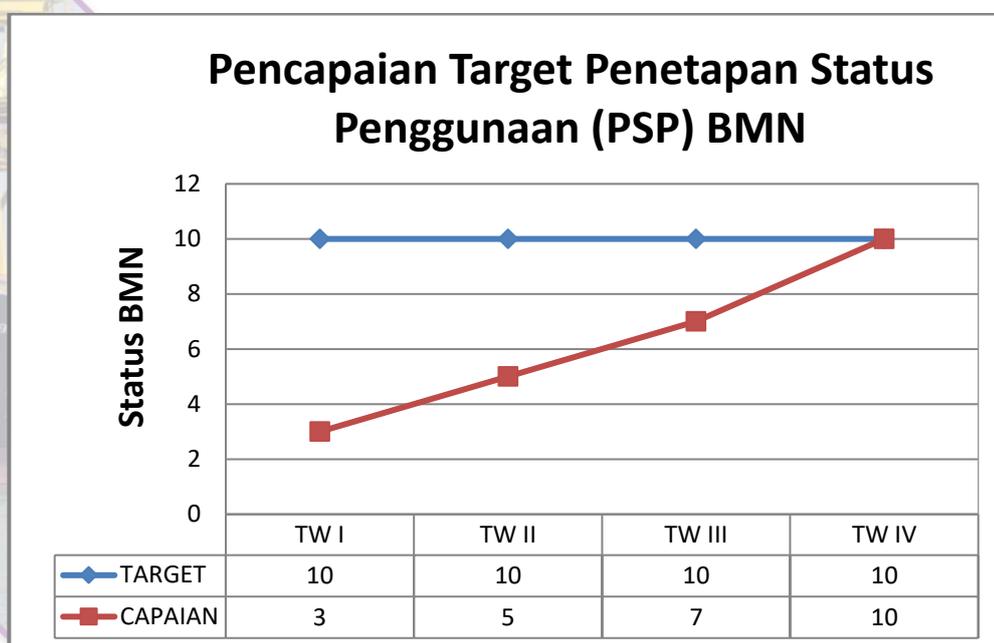
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
KK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Status BMN	10	3	5	7	10	10	100

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sejumlah 10 kegiatan (lokasi). Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sejumlah 3 kegiatan (lokasi) yaitu PSP Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Selor, KUPP Kelas III Pulau Bunyu dan KUPP Kelas III Labuhan sehingga persentase pencapaiannya sebesar 33,33%. Triwulan II terdapat 2 kegiatan (lokasi) Capaian Lokasi Yaitu PSP KSOP Kelas III Kuala Samboja pada Bulan April sebesar 99,98% dan KSOP Kelas IV Kuala Langsa pada Bulan Juni sebesar 51,22% sehingga belum mencapai target yang

telah ditetapkan karena masih dalam proses verifikasi BMN. Pada Triwulan III terdapat 2 kegiatan (lokasi) Direktorat Kenavigasian tercatat sudah 92.83% BMN yang telah di PSP kan, serta KSOP Kelas II Patimban tercatat 87.23% BMN yang telah di PSP kan, Pada Triwulan IV terdapat 3 kegiatan (lokasi) capaian lokasi yaitu pada Bulan Oktober KUPP Kelas III Batahan tercatat PSP sudah 99,94%, di Bulan November KUPP Kelas II Tual sebesar 90,95%, dan di Bulan Desember KSOP Kelas I Sorong sebesar 96,06% sehingga realisasi pada Tahun 2022 sebesar 10 status BMN dan persentase pencapaiannya sebesar 100% telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik III.3.10 Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN



Tabel III.3.32 Realisasi Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara (BMN)

No.	Lokasi	Total BMN		BMN yang sudah di PSP		Persentase	Triwulanan
		Kuantitas	Luas (m2)	Kuantitas	Luas (m2)		
1.	KUPP Tanjung Selor	198	2.419	136	2.419	95.52	I
2.	KUPP Kelas III Pulau Bunyu	148	2.244	105	2.174	95.96	
3.	KUPP Kelas III Labuhan	466	17.745	412	9.188	68.28	
4.	KSOP Kelas III Kuala Samboja	282	279.243	281	279.243	99.98	II



5.	KSOP Kelas IV Kuala Langsa	752	6.053	617	2638	51.22	
6.	Direktorat Kenavigasian	1.032	7.983	1.004	6.534	92.83%	III
7.	KSOP Kelas II Patimban	567	428.320	549	420.758	87.23%	
8.	KUPP Kelas III Batahan	287	308.761	248	308.629	99,94%	IV
9.	KUPP Kelas II Tual	1.184	26.180	1.118	15.944	90,95%	
10.	KSOP Kelas I Sorong	1.074	231.550	904	228.386	96,06%	

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla (IKK 10) Kesepuluh (10) :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10) adapun target dan realisasi kinerja pada Tahun 2022 dengan Tahun 2021 sebesar 10 jumlah PSP sehingga prosentasi sebesar 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)

IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	Jumlah	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Status BMN	Target	10	10
				Realisasi	10	10
				Kinerja (%)	100	100

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 10) Kesepuluh (10):**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10) ” **Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla**” pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja 10 Jumlah Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sedangkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 10% sehingga persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla dan persentase pencapaiannya sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	Status BMN	10	10	100

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

k. **Jumlah KSP Yang Dilaksanakan**

1) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KSP Yang Dilaksanakan (IKK 11) Kesebelas (11) :**

Tabel III.3.35 Jumlah KSP Yang Dilaksanakan

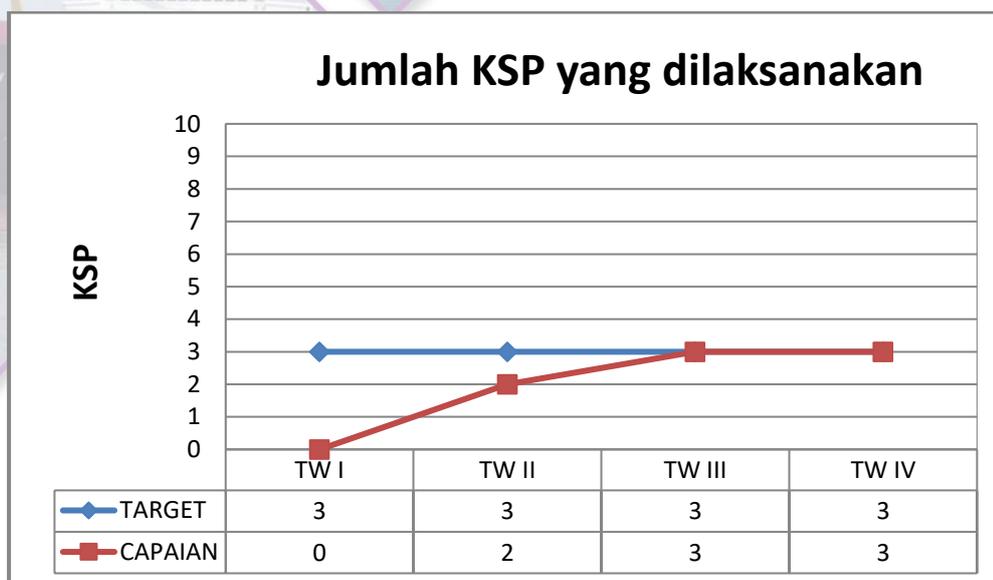
INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 11	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	KSP	3	0	2	3	3	3	100

Sumber data : Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Adapun sesuai dengan target KSP Tahun 2022 sebanyak 3 jumlah. Pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena masih dalam proses, terjadwal pada bulan April akan dilaksanakan 2 penandatanganan KSP yaitu pada KUPP Kelas IV Badas dan KUPP Kelas IV Waingapu dengan PT. Pelabuhan Indonesia (persero) sehingga persentase pencapaiannya sebesar 22,22% , dan pada bulan September telah dilakukan penandatanganan KSP yaitu KSOP belum mencapai target yang telah ditetapkan karena masih dalam proses negosiasi, proses perijinan dokumen, sinkronisasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP) yaitu Kementerian Lembaga Daerah dan Instansi (K/L/D/I). Pada Triwulan III dibulan September terealisasi Kerjasama Pemanfaatan (KSP) BMN antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT.Pelabuhan Indonesia (PERSERO) di KSOP Kelas IV BIMA. Pada Triwulan IV tidak ada penambahan, sehingga realisasi Kerjasama Pemanfaatan (KSP) pada Tahun 2022 sebesar 3 prosentase capaian kinerja terhadap target mencapai 100% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik III.3.11 Jumlah KSP Yang Dilaksanakan



Adapun upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Bagian Umum dan Perlengkapan untuk meningkatkan Jumlah Kerjasama Pemanfaatan (KSP) sebagai berikut :

- Menyamakan nilai dan luas asset antara yang diusulkan dengan yang tercatat;
- Melakukan sosialisasi terhadap Kementerian Lembaga Daerah dan Instansi (K/L/D/I) terkait kelengkapan dokumen Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
- Mensinkronisasi antara Mitra Kerja dan Kementerian Lembaga Daerah dan Instansi (K/L/D/I).



2) **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KSP Yang Dilaksanakan (IKK 11)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (11) adapun target dan realisasi kinerja pada Tahun 2022 dengan Tahun 2021 sebesar 3 KSP sehingga prosentasi sebesar 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas (11)

IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	Jumlah	Jumlah KSP yang dilaksanakan	KSP	Target	3	3
				Realisasi	3	3
				Kinerja (%)	100	100

Sumber data : Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KSP Yang Dilaksanakan (IKK 11) Kesebelas (11) :**

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kesebelas (11) "Jumlah KSP yang dilaksanakan" pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja 3 Jumlah KSP yang dilaksanakan sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 3 Jumlah Jumlah KSP yang dilaksanakan dan persentase pencapaiannya sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas(11)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	KSP	3	3	100

Sumber data : Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



D. ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

Tabel III.4.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI I	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9	9	0	-	-	-	-
		IKK 2	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300	120	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	1.993.910.000	1.757.160.000	-	Sudah Realisasi Pembayaran Angkatan I,II, dan III
						60	Training Course for Instructor (TOT IMO Model Course 6.09)	488.000.000	488.000.000	-	Sudah Realisasi pembayaran (Angkatan I dan II)
						60	BST, SAT, AFF	745.076.000	745.076.000	-	Sudah realisasi pembayaran Angkatan I dan pelaksanaan Angkatan II)
					60	Upgrading Ijazah				-	Upgrading sudah dilaksanakan dan sudah



							Pelaut (Dek DPKN TK.III Mesin 1.019.112.000	1.082.880.000 1.019.112.000	Dek 1.082.880.000 Mesin 1.019.112.000	-	realisasi pembayarann ya Dek dan Mesin
		IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85	83	Penyusunan Buku Statistik Ditjen Hubla	200.000.000	199.905.600		
							Sosialisasi Sistem Informasi Ditjen Hubla	550.000.000	550.000.000		
							Workshop Pengelolaa n TIK Ditjen Hubla	1.238.000.000	1.237.312.750		
							Maintenanc e Portal Hubla Ditjen Hubla	200.000.000	187.035.000		
							Maintenanc e Server Ditjen Hubla	200.000.000	199.375.000		



						Maintenance Aplikasi SIRANI Ditjen Hubla	200.000.000	187.590.000		
						Bimtek Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Ditjen Hubla	0	0		Dana dialihkan kegiatan workshop
						Helpdesk Sistem Informasi Datin Hubla	0	0		Dana dialihkan ke workshop
						Pemeliharaan Aplikasi SEHATI Ditjen Hubla	2.300.000.000	2.294.344.750		
						Pengelolaan Data Kepelabuhanan	200.000.000	182.456.250	100%	
	IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kepuasan	Skala	4	4	Penyusunan Buku Statistik Ditjen Hubla	Survey Kepuasan Atas Informasi Kehumasan	0	0	0
						Monitoring Pejabat Pengelola Informasi dan	Monitoring Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Pagu Awal = 200.000.000 Pagu Akhir = 97.454.000	97.451.390	0



							Dokumenta si (PPID)				
							Workshop Keterbukaa n Informasi Publik Ditjen Hubla	Pagu Awal = 400.000.000	0	0	Penghematan Anggaran dan Anggaran Workshop KIP Dialogasikan ke Bimtek Kehumasan
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama di Bidang Transportasi Laut	Kerjasa ma	21	27	Menyusun Naskah kesepakata n bersama dan atau Perjanjian Kerjasama	Pagu Awal : 446.543.000 Pagu Akhir : 574.887.000 Pagu Akhir : 632.343.000 Pagu Akhir : 681.743.000	675.438.666	-	
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	80,42	-	-	-	-	-
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	3,578	-	-	-	-	-
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	98,24	97,38	Penyusuna n Dokumen Anggaran	Pagu Awal = 1.225.728.000 Pagu Akhir = 3.458.757.000	3.325.954.880		-



							Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kegiatan	Pagu Awal = 791.532.000 Pagu Akhir = 1.727.412.000	1.704.136.490		-
							Monitoring Daya Serap DIPA	Pagu Awal = 1.350.770.000 Pagu Akhir = 1.610.490.000	1.326.842.790		-
							Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT	Pagu Awal = 2.329.821.000 Pagu Akhir = 1.916.120.000	1.915.749.060		-
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	Jumlah	14	14	Menetapkan Rancangan dan peraturan yang ditetapkan	Pagu Awal : 1.544.422.000 Pagu Akhir: 2.534.878.000	2.531.519.412		
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Jumlah	10	10	-	-	-	-	-



		IKK11	Jumlah KSP yang Dilaksanakan	Jumlah	3	3	-	-	-	-	-
--	--	-------	------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---





E. REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2022 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.5.1 Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022**

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Belanja Pegawai	135.510.660.000	107.684.494.000	107.334.969.890
2	Belanja Barang	244.967.930.000	236.498.794.000	235.475.628.292
3	Belanja Modal	16.389.544.000	11.504.081.000	11.411.375.528
	TOTAL PAGU	396.868.134.000	355.687.369.000	
	TOTAL REALISASI			354.221.973.710
	TOTAL SISA DANA			1.465.395.290

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Posisi 25 Januari 2023))



BAB IV

PENUTUP

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2022

IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Capaian Kinerja Sekretariat Ditrektorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 Tingkat Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berikut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) **Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan**

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 9%. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tidak terdapat realisasi, dikarenakan untuk tahun 2022 Kementerian Perhubungan belum menyelenggarakan penerimaan CPNS, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 0%.

2) **Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut**

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 300 sertifikat. Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 300 sertifikat. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi sebesar 150 Sertifikat sehingga Prosentase Pencapaian terhadap target sebesar 50%, sedangkan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 240 Sertifikat sehingga Prosentasi Pencapaian Terhadap Target sebesar 72 %. Pada realisasi Triwulan IV menjadi 300 sertifikat sehingga prosentase terhadap target sebesar 100%. Pada Tahun 2022 terdapat penambahan 60 sertifikat dari kegiatan pelaksanaan Diklat Peningkatan Perwira Kapal Negara (DPKN).

3) **Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut**

Adapun Sesuai dengan target tahun 2022 nilai rata-rata keandalan sistem informasi Ditjen Hubla sebesar 85% dengan realisasi pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III sebesar 85% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%, sedangkan Triwulan IV sebesar 83% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 97,65%, dikarenakan Sistem Elektronik



Hubla Terintegrasi (SEHATI) beberapa kali mengalami *downtime*. Ini diakibatkan karena transaksi yang begitu tinggi pada layanan e-blanko PNPB yang mengakibatkan kapasitas server kami tidak dapat menampung transaksi tersebut. Adapun sistem Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI), Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIRANI) dan Portal Hubla dapat diakses 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu. Dengan adanya *downtime* tersebut mengakibatkan turunnya persentase kehandalan sistem Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

4) **Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan**

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 Indeks kepuasan publik sebesar 4 dengan nilai indeks maksimal sebesar 5. Terlihat pada Triwulan I, II, III dan IV tercapai hasil perhitungan pada Skala 4 dengan jumlah rata-rata responden 10 orang, sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan dalam mengakses permohonan informasi dan data terkini yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi.

5) **Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut**

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sebanyak 21 Perjanjian Kerja sama. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II terdapat realisasi sebesar 12 Perjanjian Kerja Sama sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 57.14%. Dan untuk Triwulan III terdapat realisasi sebesar 23 Perjanjian Kerja Sama sehingga pencapaian terhadap target 109% dikarenakan terdapat penambahan usulan 2 Perjanjian Kerjasama. Untuk Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 27 Perjanjian Kerja Sama sehingga terdapat target sebesar 128% sehingga melebihi target yang telah ditetapkan karena ada penambahan usulan 4 Perjanjian Kerjasama.

6) **Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut**

Untuk Tahun 2022 target dari Nilai AKIP sebesar 85 Nilai. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II tidak terdapat realisasi karena belum ada Evaluasi Penilaian dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Pada Triwulan III dan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 80,42 sehingga prosentase Kinerja sebesar 94,61%.



7) Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut

Untuk Tahun 2022 target dari Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut sebesar 3 Nilai. Terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena belum ada evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Sedangkan pada Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV terdapat Realisasi Nilai Maturitas SPIP sebesar 3,578 pertanggal 30 Juni 2022 yang tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Nomor KP. 904/2/9 Phb 2022 Perihal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2021/2022, sehingga Persentase Kinerja sebesar 119,26%

8) Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut

Sesuai dengan Nota Dinas dari Bagian Keuangan nomor 43/BK/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 hal Usulan Perubahan Target Indikator Kinerja Bagian Keuangan pada Perjanjian Kinerja Bagian Keuangan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdapat perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8: Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut dari 97,17% menjadi 98,24% hal ini dikarenakan adanya sisa dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan karena menyesuaikan turunnya prognosa Kementerian Perhubungan yang mengakibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menurunkan persentase target IKK tahun 2022.

Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi anggaran sebesar 13,55%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 31 Maret 2022 yang diakses pada tanggal 14 Desember 2022, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 14,07%.

Pada Triwulan II sebesar 36,70%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 30 Juni 2022 yang diakses pada tanggal 14 Desember 2022, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 38,11%.

Pada Triwulan III sebesar 58,57%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 30 September 2022 yang diakses pada tanggal 14 Desember 2022, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 60,82%.

Pada Triwulan IV terdapat perubahan target dari sebelumnya 96,30% menjadi 98,24% dengan data dukung Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan Nomor 14/BK/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Usulan Perubahan Indikator Kinerja 8 Pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022, berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian



Kuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 31 Desember 2022 yang diakses pada tanggal 5 Januari 2023 terdapat realisasi sebesar 97,38%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 99,12%.

9) Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut

Adapun sesuai dengan target Tahun 2022 sebanyak 14 Peraturan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 5 Rancangan Peraturan Menteri dan pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 3 Rancangan Peraturan Menteri. Sehingga prosentase pencapaiannya sebesar 57,14% belum mencapai target yang telah ditetapkan karena masih dalam proses penyusunan.

Adapun pada Triwulan I dan II sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kelaiklautan Dan Operasional Kapal Penumpang Di Bawah Permukaan Air (*Passenger Submersible Craft*) Berbendera Indonesia;
- b) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kemudahan Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing Dan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing Di Perairan Indonesia;
- c) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kelaiklautan dan Pengoperasian Kapal Selam Penumpang Berbendera Indonesia;
- d) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kelaiklautan Kapal Bersayap Dengan Efek Permukaan (*Wing In Ground Effect Craft*) Berbendera Indonesia;
- e) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non Convention Vessel Standart*) Berbendera Indonesia;
- f) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi;
- g) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kelaiklautan Kapal Bersayap Dengan Efek Permukaan (*Wing In Ground Effect Craft*) Berbendera Indonesia;
- h) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif;

Pada Triwulan III dan IV sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan. Adapun 6 Peraturan Perundang-undangan yang masih dalam proses penyusunan tersebut antara lain :



- a) Pembahasan Rancangan Keputusan Dirjen Hubla tentang Petunjuk Teknis Sim KPLP;
- b) Pembahasan Rancangan Keputusan Dirjen Hubla tentang Dokumen Panduan Buku Nasional mengenai Pengawasan Kepatuhan dan Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Pengendalian Sistem Antiteritip (Anti Poulng System) dan Sistem Manajemen Air balas (Ballast Water Manajemen System) oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (FSI) / Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO) di Indonesia;
- c) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2015 Tentang Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing;
- d) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia;
- e) Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Bidang Kenavigasian Oleh Pemerintah Dan Badan Usaha;
- f) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa Di Laut Berserta Amandemennya

10) Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sejumlah 10 kegiatan (lokasi). Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sejumlah 3 kegiatan (lokasi) yaitu PSP Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Selor, KUPP Kelas III Pulau Bunyu dan KUPP Kelas III Labuhan sehingga persentase pencapaiannya sebesar 33,33%. Triwulan II terdapat 2 kegiatan (lokasi) Capaian Lokasi Yaitu PSP KSOP Kelas III Kuala Samboja pada Bulan April sebesar 99.98% dan KSOP Kelas IV Kuala Langsa pada Bulan Juni sebesar 51,22% sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan karena masih dalam proses verifikasi BMN. Pada Triwulan III terdapat 2 kegiatan (lokasi) Direktorat Kenavigasian tercatat sudah 92.83% BMN yang telah di PSP kan, serta KSOP Kelas II Patimban tercatat 87.23% BMN yang telah di PSP kan, Pada Triwulan IV terdapat 3 kegiatan (lokasi) capaian lokasi yaitu pada Bulan Oktober KUPP Kelas III Batahan tercatat PSP sudah 99,94%, di Bulan November KUPP Kelas II Tual sebesar 90,95%, dan di Bulan Desember KSOP Kelas I Sorong sebesar 96,06% sehingga realisasi pada Tahun 2022 sebesar 10 status BMN dan persentase pencapaiannya sebesar 100% telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



11) Jumlah KSP Yang Dilaksanakan

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sebanyak 9 jumlah. Pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena masih dalam proses, terjadwal pada bulan April akan dilaksanakan 2 penandatanganan KSP yaitu pada KUPP Kelas IV Badas dan KUPP Kelas IV Waingapu dengan PT. Pelabuhan Indonesia (persero) sehingga persentase pencapaiannya sebesar 22,22% , dan pada bulan September telah dilakukan penandatanganan KSP yaitu KSOP belum mencapai target yang telah ditetapkan karena masih dalam proses negosiasi, proses perijinan dokumen, sinkronisasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP) yaitu Kementerian Lembaga Daerah dan Instansi (K/L/D/I). Pada Triwulan III dibulan September terealisasi Kerjasama Pemanfaatan (KSP) BMN antara Ditjen Hubla dengan PT.Pelabuhan Indonesia (PERSERO) di KSOP Kelas IV BIMA. Pada Triwulan IV tidak ada penambahan, sehingga prosentase capaian kinerja terhadap target mencapai 100% dan sudah sesuai dengan target

IV.2 Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak terlepas dari dukungan jajaran seluruh unit kerja yang ada serta diperlukan kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2022



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2022

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARIF TOHA**
Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIF TOHA**
Jabatan : **Pit. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2022

PIHAK KEDUA
Pit. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut					
SK 6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di Bidang transportasi laut	Kerjasama	21
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	96,30
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Konsep peraturan	14
		IKK 10	Pencapaian target penetapan status penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	10
		IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	KSP	9

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut
5. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut
6. Penunjang Teknis Transportasi Laut

Anggaran

- Rp. 31.656.770.000,-
Rp. 293.871.892.000,-
Rp. 27.872.417.000,-
Rp. 7.906.893.000,-
Rp. 5.890.000.000,-
Rp. 29.670.162.000,-

Disetujui

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003

Jakarta,

2022

SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



REVIU PERJANJIAN KINERJA

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2022**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

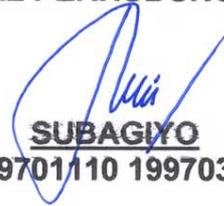
Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Reviu Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2022

**Pt. SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



SUBAGIYO

NIP. 19701110 199703 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SUBAGIYO**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIF TOHA**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2022

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003

PIHAK PERTAMA
Plt. SEKRETARIS DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

SUBAGIYO
NIP. 19701110 199703 1 001

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut					
SK	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di Bidang transportasi laut	Kerjasama	21
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	96,30
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Konsep peraturan	14
		IKK 10	Pencapaian target penetapan status penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	10
		IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	KSP	9

Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	Rp. 31.656.770.000,-
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut	Rp. 293.871.892.000,-
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut	Rp. 27.872.417.000,-
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut	Rp. 7.906.893.000,-
5. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	Rp. 5.890.000.000,-
6. Penunjang Teknis Transportasi Laut	Rp. 29.670.162.000,-

Disetujui

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

NIP. 19670320 199203 1 003

Jakarta,

2022

Pt. SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



SUBAGIYO

NIP. 19701110 199703 1 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2022



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT**

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	Penanggung jawab				
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1 Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9	Menunjuk Kabag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Kabag Kepegawaian			
					1 Menyampaikan surat usulan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla kepada Menpan RB melalui Biro Kepegawaian sesuai dengan usulan dari UPT (TW. I);			1															
					2 Melaksanakan Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS 2022								1										
					3 Melakukan pemetaan penyebaran SDM Ditjen Hubla (1tahun)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	IKK 2 Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	300	Menunjuk Kabag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	Kabag Kepegawaian		
				- Meningkatkan jumlah peserta Diklat yang lulus dan bersertifikat	80	40																2.138.140.000	
	IKK 3 Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	85	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	Kabag Organisasi dan Humas		
				1 Penyusunan Informasi Statistik Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas							1	1	1									200.000,000	
				2 Sosialisasi Sistem Informasi Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1.000.000,000	
				3 Workshop pengelolaan TIK Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas							1	1	1	1	1	1	1					800.000,000	
4 Maintenance Portal Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas																		1		200.000,000			

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	Penanggung jawab	
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					5 Maintenance Server Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas												1	200,000,000		
					6 Maintenance Aplikasi SIRANI Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas												1	200,000,000		
					7 Bimtek Pengelola Prangkat Keras dan Perangkat Lunak Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas	1	1	1	1	1	1							300,000,000		
					8 Helpdesk Sistem Informasi Datin Hubla												1	200,000,000		
					9 Pengembangan Aplikasi SEHATI Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas				1	1	1							900,000,000		
		IKK 4 Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Kabag Organisasi dan Humas
					1 Survey kepuasan informasi atas layanan informasi/kehumasan			1			1			1			1			
					2 Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perhubungan Laut							1						400,000,000		
					3 Monitoring Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)						1		1		1			200,000,000		
		IKK 5 Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di bidang transportasi laut	Kerjasama	21	Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Kabag Hukum dan KLSN
					1 Penyusunan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama	0	1	1	2	2	2	3	2	2	3	2	1	446,543,000		
				15	2 Keterlibatan dalam kerjasama internasional	1	2	1	2	1	1	2	0	1	1	1	2	1,473,507,000		
		IKK 6 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Kabag Perencanaan

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	Penanggung jawab		
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
					1 Melaksanakan Bimtek dan sosialisasi serta monitoring penyusunan Dokumen SAKIP kepada UPT/ SDM Dijen Hubla sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait		1	2	1		1	1		1	3		1	4,913,908,000			
					2 Monitoring dan Pendampingan Penyusunan Dokumen SAKIP kepada UPT/SDM Dijen Hubla sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
					3 Penyusunan Dokumen Reviu Renstra 2020-2024									1				821,545,000			
	IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Dijen Perhubungan Laut	Nilai	3	Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Perencanaan		
					1 Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		1											895,346,000			
	IKK 8	Persentase Daya Serap Dijen Perhubungan Laut	%	97,17	Menunjuk Kepada Kabag Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Keuangan		
					1 Penyusunan Dokumen Anggaran	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	-	-		1,225,728,000	
					2 Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kegiatan	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302		791,532,000	
					3 Monitoring Daya Serap DIPA	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302		1,350,770,000	
					4 Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT	-	-	-	302	-	-	-	-	-	302	-	-	2,329,821,000			

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	Penanggung jawab	
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep peraturan baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Jumlah	14	Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KSLN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Direktur Jenderal	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	592.226.000	Kabag Hukum dan KLSN
		IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Dijen Hubla	%	10	Menunjuk Kepada Kabag Umum dan Perlengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: - Memastikan penginputan aplikasi SIMAN BMN oleh UPT berjalan dengan baik dan tepat waktu	2	1	1	1		2	1				1	1		Kabag Umum dan Perlengkapan
		IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	Jumlah	3	Menunjuk Kepada Kabag Umum dan Perlengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: - Memenuhi seluruh kriteria kegiatan yang akan di KSP sesuai dengan peraturan yang ada						1					1			Kabag Umum dan Perlengkapan

Jakarta,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670320 199203 1 003